



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

Jln. J. F. Puttileihat - Piru



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020



**Terwujudnya Masyarakat
Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera
Berbudi Pekerti Luhur Dan Berbudaya
Berbasis Potensi Ekonomi Lokal**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan LAKIP Tahun 2020, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2020 dapat diselesaikan.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil pembangunan, namun disadari masih jauh dari sasaran pembangunan yang diharapkan. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami sadari sungguh bahwa LAKIP Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, karenanya berbagai saran dan masukan demi penyempurnaan LAKIP ini kedepan sangat kami harapkan. Akhirnya semoga LAKIP ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

TerimaKasih.

Piru, 30 Maret 2021

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO



IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah melaporkan kinerjanya selama setahun dalam memberikan pelayanan publik baik yang berkenaan langsung maupun tidak, termasuk didalamnya kegagalan pencapaian keberhasilan. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 ini merupakan amanat seperti yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai

yang digubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIP dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemda dalam hal ini kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja tahun 2020 telah berhasil dicapai. Sebagai pembanding, kualitas pencapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten secara umum dapat dilihat dari gambaran perkembangan kondisi makro Kabupaten Seram Bagian Barat. Indikator makro Kabupaten Seram Bagian Barat mencerminkan angka-angka atau nilai-nilai perkembangan atau perubahan kondisi sosial, ekonomi dan pembangunan manusia. Gambaran kondisi sosial dilihat dari data kependudukan, laju pertumbuhan penduduk, dan angka kemiskinan, gambaran kondisi ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, kondisi PDRB, laju pertumbuhan investasi, dan pendapatan perkapita pertahun, dan gambaran keberhasilan pembangunan manusia/kualitas sumber daya manusia baik fisik maupun non fisik dapat terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia. Selain itu juga, capaian kinerja juga mengacu pada Indikator Kinerja yang berlaku secara umum sesuai dengan benang merah satuan kegiatan berdasarkan sasaran yang telah diwadahi dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang juga menjadi tujuan dari penyusunan LAKIP, maka hasil evaluasi capaian kinerja ini pula dianggap penting dipergunakan oleh instansi lingkup Pememerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang. Dengan ini,

upaya dan sinergi kinerja pelayanan publik terhadap kesejahteraan rakyat akan terus diprioritaskan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran – sasaran strategisnya dengan rata-rata capaian kinerja 78,23% atau berkategori ”Sangat Baik”. Sasaran sebagaimana yang tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2020 berjumlah 18 sasaran yang memuat 97 indikator kinerja. Adapun hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran-sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian barat tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatnya Pembenahan Kapasitas Pemerintah Yang Prima dengan capaian 71,43 % kategori predikat Sangat Baik, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja.
2. Sasaran Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparat Sipil Negara dengan capaian 52,98 % kategori predikat Cukup, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.
3. Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang dengan capaian 177,28 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja.
4. Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik dengan capaian 95 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.
5. Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama dengan capaian 95 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.
6. Sasaran Menurunnya Angka KDRT dengan capaian kategori predikat Sangat Kurang, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yang tidak mencapai target.
7. Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat dengan capaian kategori predikat Sangat Kurang, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.
8. Sasaran Teraktualisasinya nilai-nilai budaya Pela Gandong dan Masohi sebagai modal sosial pembangunan Kabupaten Seram Bagian

- Barat dengan capaian 66,67 % kategori predikat Baik, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.
9. Sasaran Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan Pelayanan Pendidikan dengan capaian 78,28 % kategori predikat Baik, dengan 32 (tiga puluh dua) Indikator Kinerja.
 10. Sasaran Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dengan capaian 96,46 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja.
 11. Sasaran Meningkatnya kinerja koperasi, industri kecil dan usaha mikro dengan capaian 107,04 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 5 (lima) Indikator Kinerja.
 12. Sasaran Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan dengan capaian 93,83 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja.
 13. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dengan capaian 89,6 % kategori predikat Memuaskan, dengan 2 (dua) Indikator Kinerja.
 14. Sasaran Meningkatnya kualitas dan kuantitas infastruktur dengan capaian 77,77 % kategori predikat Sangat Baik, dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja.
 15. Sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup dengan capaian 46 % kategori predikat Cukup, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja.
 16. Sasaran Terbukanya isolasi daerah sekaligus menunjang pembangunan potensi kepariwisataan dengan capaian 30,94 % kategori predikat Sangat Kurang, dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.
 17. Sasaran Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah dengan capaian 103,5% kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 6 (enam) Indikator Kinerja.

18. Sasaran Meningkatnya daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi lokal dengan capaian 126,53 % kategori predikat Sangat Memuaskan, dengan 1 (satu) Indikator Kinerja.

Dengan hasil pencapaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* demi mewujudkan Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xiv

BAB I. PENDAHULUAN ◆ 1



A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	4
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Permasalahan Utama Tahun 2020	9
E. Sistematika Penyajian	15

BAB II. PERENCANAAN KINERJA ◆ 17



A. Perencanaan Strategis	18
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	22

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ◆ 28



A. Capaian Kinerja	29
B. Realisasi Anggaran	119

BAB IV. PENUTUP ◆ 135



LAMPIRAN	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	
Lampiran 2. Capaian Kinerja Pemerintah Kab. Seram Bagian Barat	



DAFTAR TABEL



Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020	23
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kerja Berdasarkan Permen PAN - RB Nomor 12 Tahun 2015	30
Tabel 3.2	Capaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima Tahun 2020	32
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	33
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	34
Tabel 3.5	Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Negara Tahun 2020	39
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Negara Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	40
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Sipil Negara Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	40
Tabel 3.8	Tingkat Pendidikan Formal dengan Jabatan Struktural	41
Tabel 3.9	Tingkat Kompetensi Aparatur	41
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang Tahun 2020	43
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019.....	43
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	44
Tabel 3.13	Capaian Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik Tahun 2020	49

Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019.....	49
Tabel 3.15	Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama Tahun 2020	51
Tabel 3.16	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	51
Tabel 3.17	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	51
Tabel 3.19	Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020	53
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	53
Tabel 3.21	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	54
Tabel 3.22	Capaian Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2020	56
Tabel 3.23	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	56
Tabel 3.24	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	57
Tabel 3.25	Capaian Sasaran Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020	59
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019.....	59
Tabel 3.27	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	59
Tabel 3.28	Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Tahun 2020	61

Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019.....	64
Tabel 3.30	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	67
Tabel 3.31	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Tahun 2020 dengan Target Nasional	69
Tabel 3.32	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020	80
Tabel 3.33	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	81
Tabel 3.34	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	82
Tabel 3.35	Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat Tahun 2020	87
Tabel 3.36	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	88
Tabel 3.37	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	88
Tabel 3.38	Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2020	92
Tabel 3.39	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	93
Tabel 3.40	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	93
Tabel 3.41	Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2020	97

Tabel 3.42	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	98
Tabel 3.43	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	98
Tabel 3.44	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur Tahun 2020	99
Tabel 3.45	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	100
Tabel 3.46	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Kinerja Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	101
Tabel 3.47	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020	106
Tabel 3.48	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	106
Tabel 3.49	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	107
Tabel 3.50	Capaian Sasaran Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwiatawan Tahun 2020	109
Tabel 3.51	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwiatawan Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019.....	110
Tabel 3.52	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwiatawan Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	111
Tabel 3.53	Capaian Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Potensi Kepariwiatawan Tahun 2020	114
Tabel 3.54	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Potensi Kepariwiatawan Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019	115

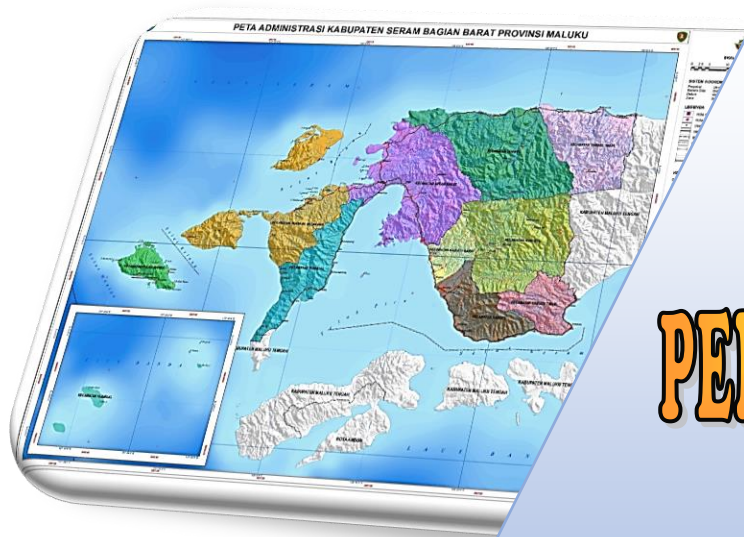
Tabel 3.55	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Potensi Kepariwisata Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	116
Tabel 3.56	Capaian Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal Tahun 2020	117
Tabel 3.57	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019.....	117
Tabel 3.58	Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022	118
Tabel 3.59	Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat per OPD tahun 2020	119
Tabel 3.60	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Penunjang Sasaran Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 (status s/d Desember 2020)	124



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Jumlah Desa dan Dusun Per Kecamatan Dalam Kabupaten	11
Grafik 1.2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	12
Grafik 1.3	Sebaran luas wilayah per Kecamatan dalam Kabupaten	12
Grafik 3.1	Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	35
Grafik 3.2	Realisasi Presentase Peningkatan Pendapatan di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	36
Grafik 3.3	Perbandingan Realisasi Pembentukan BUMDes di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	45
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Cakupan Kelompok Binaan PKK di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	46
Grafik 3.5	Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Per Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	71
Grafik 3.6	Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	83
Grafik 3.7	Perbandingan Realisasi Angka Umur Harapan Hidup di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	84
Grafik 3.8	Angka Gizi Buruk di Kabupaten Seram Bagian Barat dari Tahun 2014 - 2018	85
Grafik 3.9	Persentase Jumlah Koperasi Per Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	89
Grafik 3.10	Persentase Jumlah Unit Usaha Industri Per Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	90
Grafik 3.11	Realisasi Presentase Konsumsi Ikan di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	94
Grafik 3.12	Jumlah Nelayan Per Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat	95
Grafik 3.13	Realisasi Presentase Produksi Hasil Perikanan di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	96
Grafik 3.14	Presentase Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat	102
Grafik 3.15	Realisasi Presentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	103

Grafik 3.16	Realisasi Presentase Fasilitas dan Infrastruktur Perhubungan Yang Baik di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	104
Grafik 3.17	Jumlah Timbunan Sampah Per Tahun Di Kabupaten Seram Bagian Barat	108
Grafik 3.18	Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	111
Grafik 3.19	Perbandingan Realisasi Produk Masyarakat Yang Masuk Pasaran di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD	118



BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan serta harapan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Penerapan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintahan untuk mewujudkan tuntutan dan harapan masyarakat tersebut.

A. Latar Belakang

Good Governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *publicgood and services* yang disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *Good Governance*. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung

jawaban yang tepat, jelas dan nyata serta perlu adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah, memperkuat organisasi dan tersedianya akses yang sama pada informasi bagi masyarakat luas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam perspektif yang luas, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempunyai fungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 ini secara garis besarnya berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru, mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan seluruh prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan negara berdasarkan amanah yang diberikan, sebagai wujud pertanggungjawaban atas kepercayaan yang diberikan oleh **stakeholders** di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2010 - 2030;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
9. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat

10. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
11. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat;
12. Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

B. Tugas Pokok, Fungsi Serta Susunan Organisasi

Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 2 - 29 Tahun 2008, tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat, dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Seram Bagian Barat yang diwadahi dalam bentuk Organisasi Staf Sekretariat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta Kecamatan. Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat digambarkan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah daerah yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, hukum dan perundang-undangan, organisasi tatalaksana, hubungan kemasyarakatan, protokoler/ rumah tangga pemerintah daerah, peningkatan SDM dan kesra, pengembangan/peningkatan perekonomian daerah, pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah serta mengkoordinasikan perangkat daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah.

Di bawah Sekretariat Daerah terdapat 3 (tiga) Asisten, Asisten yang mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari 3 (tiga) Bagian masing-masing :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
- b. Bagian Hukum dan
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) Bagian masing-masing :

- a. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Bagian Administrasi Pembangunan dan,
- c. Bagian Layanan Pengadaan.

Sedangkan Asisten Bidang Administrasi Umum, mempunyai tugas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Umum, membawahi 3 (tiga) Bagian masing-masing :

- a. Bagian Organisasi;
- b. Bagian Umum dan
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler.

2. Sekretariat DPRD

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekretariat DPRD) merupakan unsur pelayanan DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Dinas Daerah

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi Desentralisasi dan Tugas Pembantuan untuk bidang-bidang pembangunan tertentu seperti Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Perhubungan dan Kominfo, Pariwisata Dan Kebudayaan, Pekerjaan Umum, Koperasi dan UKM, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal, Pertanian dan Peternakan, Kehutanan dan Perkebunan, Pertambangan dan Energi, Kelautan dan Perikanan, Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah serta Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga teknis daerah berbentuk Inspektorat Daerah, Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dibentuk sesuai Peraturan Daerah, sebagai unsur penunjang yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk bidang-bidang tertentu.

a. Inspektorat

Inspektorat adalah perangkat teknis daerah, merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dipimpin oleh seorang Inspektur berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

b. Badan

Badan adalah perangkat teknis daerah yang diserahkan wewenang tugas, dan tanggungjawab untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah dibidang desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dipimpin oleh seorang Kepala

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berjumlah 6 (enam) yaitu Badan Perencanaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

c. Kantor

Kantor adalah unit kerja yang diserahkan tugas, wewenang dan kewajiban serta tanggungjawab dalam penyelenggaraan kepentingan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor yang berada dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat berupa Kantor Camat yang berjumlah 11 (sebelas) yaitu : Kantor Camat Seram Barat, Kantor Camat Kairatu Barat, Kantor Camat Kairatu, Kantor Camat Amalatu, Kantor Camat Inamosol, Kantor Camat Elpaputih, Kantor Camat Taniwel, Kantor Camat Taniwel Timur, Kantor Camat Huamual, Kantor Camat Huamual Belakang dan Kantor Camat Pulau Manipa.

d. Rumah Sakit Umum Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD PIRU), merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu, dipimpin oleh seorang kepala dengan sebutan Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagai akses penunjang pelayanan kesehatan terhadap masyarakat di kabupaten kami, sudah terdapat 17 puskesmas yang beroperasi dan tersebar di 92 Desa.

5. Kecamatan

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat-Camat berfungsi sebagai Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kecamatan yang berada dalam Pemerintahan Kabupaten Seram Barat ada 11 (sebelas) yaitu : Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Huamual Depan, Kecamatan Kairatu, Kecamatan Kairatu Barat, Kecamatan Inamosol, Kecamatan Amalatu, Kecamatan Elpaputih, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Taniwel Timur, Kecamatan Waesala dan Kecamatan Manipa.

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diarahkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna serta bertanggung jawab, sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Disamping itu juga diharapkan adanya peningkatan etos kerja yang berorientasi pada hasil capaian kinerja menuju pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggungjawab (*good governance*) serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pengukuran kinerja merupakan gambaran sejauh mana Pemerintah Daerah mempunyai komitmen dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam pemerintahan, sehingga kinerjanya dapat diukur dengan baik. Esensi dari Sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik dan merupakan infrastruktur bagi manajemen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk memastikan bahwa Visi, Misi dan Tujuan Strategi Pemerintah Daerah

dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dalam program dan kegiatan yang selaras.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dapat atau tidak dapat dicapai pada akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yakni :

1. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat).
2. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja.** Bagi keperluan eksternal organisasi, LKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020 merupakan sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020.
- **Aspek Manajemen Kinerja.** Bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKIP tahun 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Pemerintah Daerah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.

D. Permasalahan Umum Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020

Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan daerah integral dari wilayah Provinsi Maluku dan merupakan Kabupaten Bahari, yang terdiri dari 11

Kecamatan dan dipisahkan oleh 67 Pulau. Secara Astronomis, Kabupaten Seram Bagian Barat terletak antara 1°19' - 7°16' Lintang Selatan dan antara 127°20' - 129°1' Bujur Timur.

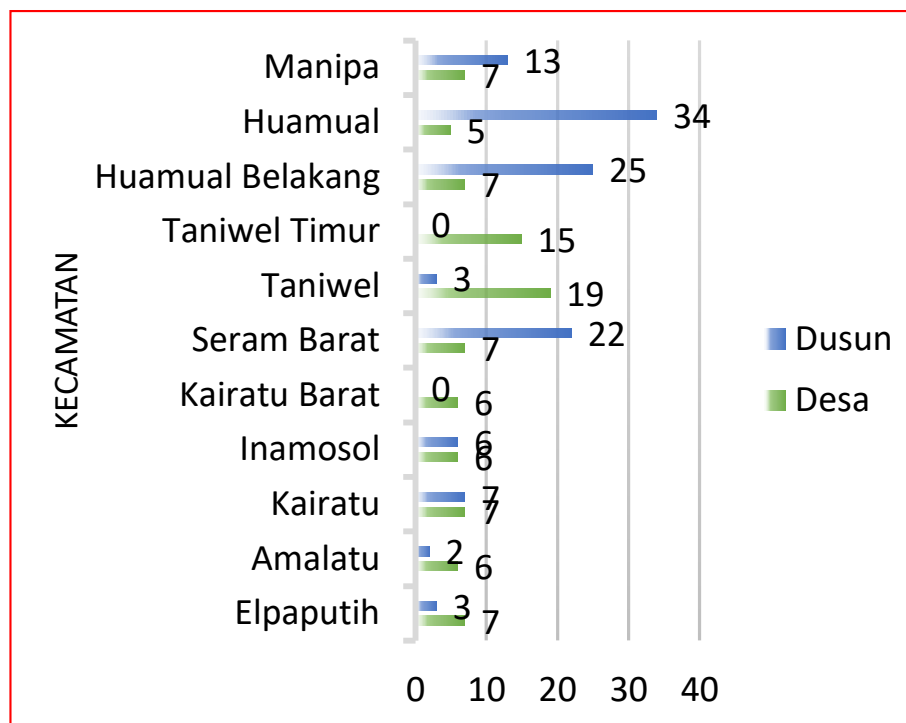


Gambar 1.1. Peta Kabupaten Seram Bagian Barat

Kabupaten Seram Bagian Barat dibatasi oleh laut seram disebelah utara, laut banda disebelah selatan, laut buru disebelah barat dan Kabupaten Maluku Tengah disebelah timur. Secara geografis memiliki luas wilayah daratan sebesar 6.948,40 km², dengan kecamatan paling luas yaitu Kecamatan Taniwel dengan luas sebesar 1.181,32 km², atau 17% dari keseluruhan luas Kabupaten Seram Bagian Barat.

Secara morfologis wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan suatu kesatuan gugus pulau terdiri dari 67 pulau yang terdiri dari 11 pulau berpenghuni dan 56 pulau tidak berpenghuni yang tersebar di seluruh Kabupaten Seram Bagian Barat yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan, mempunyai 92 desa dan 115 dusun dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,04 % dari tahun sebelumnya.

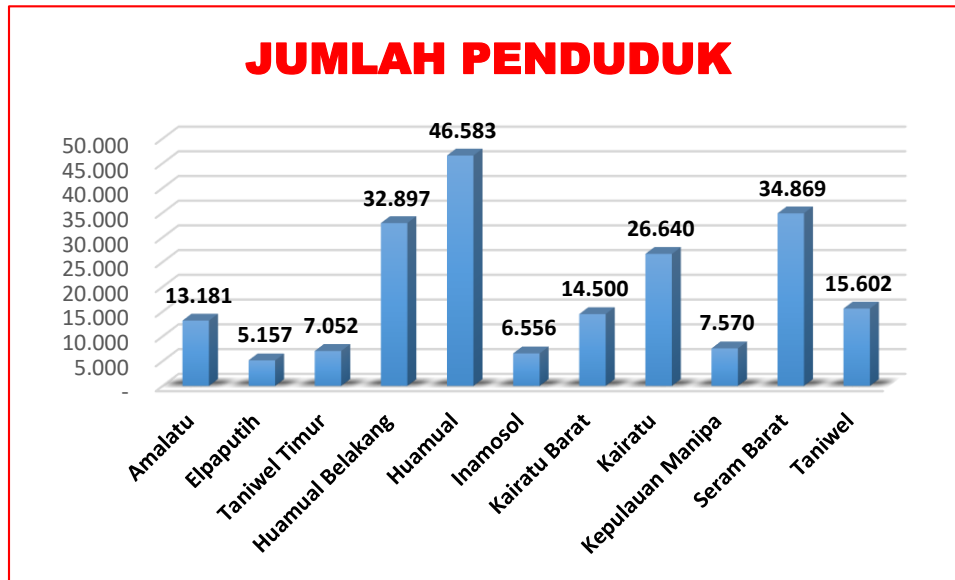
Grafik 1.1
Jumlah Desa dan Dusun Per Kecamatan Dalam Kabupaten



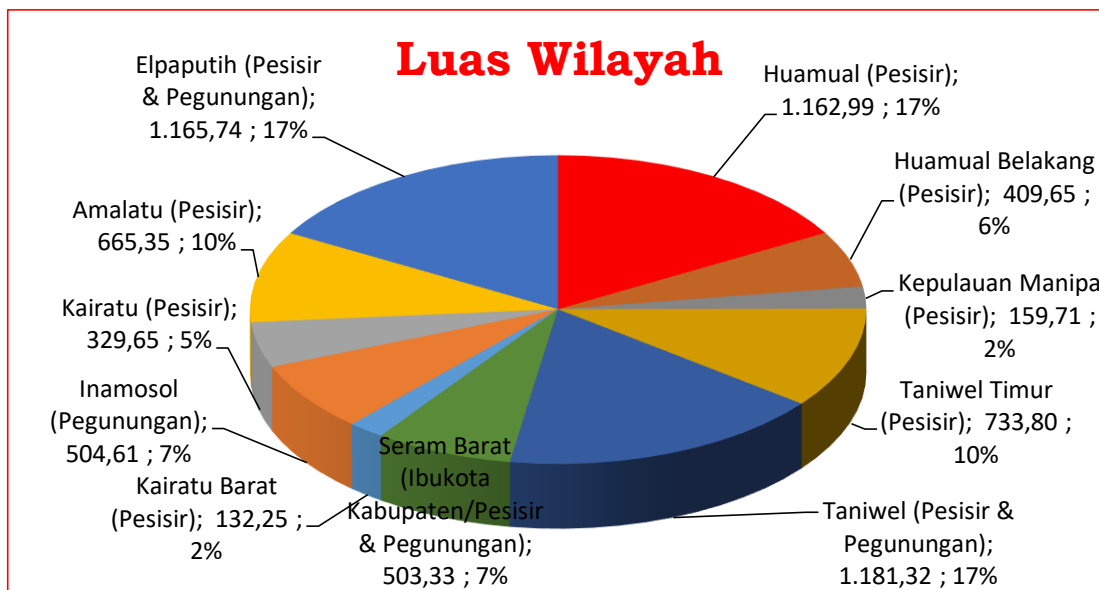
Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan salah satu Kabupaten Bahari dengan luas laut mencapai 79.005 km² dengan panjang garis pantai 719,20 km, dan memiliki 48 aliran sungai yang tersebar diseluruh Kabupaten Seram Bagian Barat. Iklim Kabupaten Seram Bagian Barat adalah iklim laut tropis dan iklim musim karena letak wilayah Seram Bagian Barat di dekat garis Khatulistiwa dan dikelilingi oleh laut luas. Oleh karena itu iklimnya sangat dipengaruhi oleh lautan bersamaan dengan iklim musim yaitu musim barat atau utara dan musim timur atau tenggara. Pergantian musimnya juga diselingi oleh musim pancaroba.

Penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020 berjumlah 210.607 jiwa dan merupakan nomor tiga terbesar di Provinsi Maluku. Komposisi jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah laki-laki sebanyak 108.903 jiwa dan perempuan sebanyak 101.604 jiwa. Sex Ratio penduduk Kabupaten Seram Bagian Barat adalah 104,5 jiwa.

Grafik 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat



Grafik 1.3
Sebaran luas wilayah per Kecamatan dalam Kabupaten



Dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Seram Bagian Barat 2010 - 2030 menyebutkan bahwa beberapa kawasan khusus telah diprioritaskan untuk dikembangkan, yaitu :

1. Kawasan Tertinggal, yaitu kawasan yang memiliki keterbatasan dalam hal sumberdaya dan aksesibilitas sehingga tidak dapat memanfaatkan ataupun menangkap peluang ekonomi yang ada. Daerah tersebut antara lain Kairatu Pegunungan dan Taniwel Pegunungan.
2. Kawasan Kritis, yaitu kawasan yang rawan terjadinya bencana alam dan pada umumnya mempunyai kemiringan lahan yang curam serta daya dukung lahan yang labil. Daerah tersebut antara lain Kairatu Pegunungan dan Taniwel Pegunungan.
3. Kawasan Kritis, yaitu kawasan yang rawan terjadinya bencana alam dan pada umumnya mempunyai kemiringan lahan yang curam serta daya dukung lahan yang labil. Daerah tersebut antara lain Kairatu Pegunungan dan Taniwel Pegunungan.
4. Kawasan Andalan, yaitu kawasan yang secara ekonomi berpotensi untuk mendorong pertumbuhan wilayah. Daerah tersebut juga termasuk Kairatu dan Seram Barat.
5. Kawasan Perkotaan, yaitu kawasan terpadu yang dikaitkan dengan fungsi sebagai ibukota yang mempunyai daya tarik bagi penanam modal. Daerah tersebut antara lain Piru, Kairatu.
6. Kawasan Perdesaan, yaitu kawasan yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan Kabupaten Seram Bagian Barat. Daerah tersebut antara lain Desa Waimital, Waihatu, Piru, Kairatu, Taniwel dan Waisala.

Wilayah yang diidentifikasi sebagai wilayah yang berpotensi rawan bencana alam sesuai RTRW Kabupaten Seram Bagian Barat 2010 - 2030 yaitu:

1. Kawasan rawan bencana banjir; Sebagai perkembangan dari zonasi kawasan rawan banjir, maka wilayah rentan bahaya banjir adalah

pada sungai Wae Sapalewa, Wae Hanuai, Wae Pana, Wae Kamasi, dan Wae Kawa di utara, serta sungai-sungai yang mengalir ke arah barat yang melalui kota Piru dan Kairatu di selatan yang rentan terhadap bahaya banjir.

2. Kawasan rawan bencana longsor; Daerah yang mudah longsor berada pada wilayah tengah Kabupaten Seram Bagian Barat, bagian timur ke utara di Semenanjung Huamual dan masing-masing di bagian tengah pulau Buano, pulau Kelang dan pulau Manipa yang dikontrol oleh patahan, kelerengan serta pola aliran sungai.

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terhadap seluruh bidang pembangunan secara terpisah atau terhadap beberapa urusan dengan berbagai keberhasilan yang telah dicapai, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain: adalah *Pertama* : adanya rentang kendali (Span of Control), sehingga mengakibatkan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dialami, serta ada beberapa wilayah yang di katakan Kawasan Rawan Bencana. Hal tersebut mengakibatkan beberapa proses pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak berjalan normal, *Kedua* : pada awal bulan Maret terjadi benca non alam (pandemi Covid19) yang terjadi di Indonesia sehingga berdampak ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga fokus pemerintah ditujukan kepada penanganan korban yang terpapar Covid19 yang mengakibatkan adanya perubahan langkah strategi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mendanai sistem pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat, *Ketiga* : Jumlah persentase penduduk miskin di Kabupaten Seram Bagian Barat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Menurut data statistik Kabupaten Seram Dalam Angka 2020, penduduk pada tahun 2018 miskin sebesar 43,770 Jiwa sedangkan tahun

2019 sebesar 43,440 Jiwa, *Keempat* : Kondisi ekonomi suatu daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Kondisi ekonomi suatu daerah adalah salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu.

E. Sistematika Penyajian Lakip Tahun 2020

Sistematika penyajian LAKIP tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Bab 1 - Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2 - Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab 3 - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. *Realisasi Anggaran*

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB 4 - **Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan strategis yang jelas dan sinergis instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017-2022, berpedoman pada Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor : 06.a Tahun 2019, tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat yang disusun telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017 – 2022. Serta mengakomodir Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Cara mencapai tujuan dan sasaran, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, selama kurung waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala yang timbul. Rencana Strategis dari masing masing Organisasi Perangkat Daerah telah memuat semua kebijakan, Strategi, dan Program Pembangunan Daerah 5 tahun mendatang.

A.1. Visi dan Misi Kabupaten Seram Bagian Barat

a) Visi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, visi menggambarkan tentang kondisi Daerah yang diharapkan terwujud atau tercapai pada akhir periode pemerintahan Bupati terpilih 2017-2022.

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal”.

b) Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan hal itu, Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini sebagai upaya untuk menjabarkan setiap visi yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat. Setiap misi memaknai target pencapaian daerah dalam kurun waktu 2017-2022 sebagai berikut :

Misi 1: *Meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, inovatif dan berwibawa.*

Misi ini mengandung makna bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk lebih meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat dan mengembangkan potensi kemampuan aparatur pemerintah daerah Seram Bagian Barat sehingga dapat berperan untuk meningkatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Selain itu, juga mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah, pemberian award (penghargaan) bagi aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan inovatif, mendorong penggunaan teknologi informatika dalam menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan terukur. Hal penting yang juga menjadi prioritas adalah pembentukan pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang dapat mengakses informasi terkini untuk penerapan *e-government*.

Misi 2: *Meningkatkan toleransi umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah).*

Misi ini mengandung makna bahwa menumbuhkembangkan toleransi kehidupan beragama di masyarakat, meningkatkan produksi dan apresiasi di bidang religius, seni dan budaya

tradisional sebagai perakat hidup orang basudara. Proses demikian diikuti dengan pembentukan dan pengembangan komunitas kerjasama antar umat beragama dan komunitas religus untuk menghindari suasana anti diskriminasi. Disamping itu, juga perlu meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian sejarah, aset kesenian dan budaya lokal serta mengoptimalkan dan memanfaatkan kearifan lokal dalam rangka membangun relasi sosial sebagai orang basudara.

Misi 3: *Mengembangkan bidang pendidikan yang berkualitas*

Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat dibutuhkan penyediaan jaminan dan pelayanan pendidikan dasar gratis selama 12 tahun, memberikan bea siswa bagi siswa berprestasi. Perhatian pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat juga tertuju pada penyediaan pusat pengembangan kegiatan belajar masyarakat, peningkatan kesejahteraan dan profesional tenaga pendidik serta pelatihan dan pendampingan bagi petani dan nelayan.

Misi 4: *Mengembangkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.*

Misi ini mengandung makna bahwa untuk meningkatkan kualitas dan derajat kesehatan masyarakat perlu diupayakan dengan pemenuhan jaminan kesehatan bagi masyarakat, mengembangkan dan menerapkan inovasu program kesehatan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Wujud tanggung jawab tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional, peningkatan pelayanan kesehatan, pengelolaan dan pengolahan persampahan serta peningkatan sistem sanitasi lingkungan. Hal mendasar yang juga diperhatikan adalah meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, penurunan angka gizi buruk dan angka kesakitan, peningkatan penanggulangan untuk

zoonosis serta pengawasan terhadap penyebaran makan, minuman dan obat-obatan.

Misi 5 : *Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.*

Misi ini mengandung makna bahwa kebijakan daerah untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dilakukan dengan meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro dan koperasi sebagai basis perekonomian rakyat (lokal), membuka dan mengembangkan akses pemasaran produk usaha mikro dan koperasi. Pengolahan potensi sumber daya alam local yang diprioritaskan pada peningkatan produksi pertanian, perikanan, peningkatan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertaniandan perikanan. Selain itu juga terus diupayakan peningkatan produktivitas perikanan tangkap dan budi daya dan peningkatan penyediaan bibit dan sarana produksi bagi petani dan nelayan.

Misi 6 : *Memperkuat pembangunan infrastruktur.*

Misi ini mengandung makna bahwa percepatan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat perlu didukung dengan peningkatan dan pembangunan jaringan jalan dan bangunan pelengkapya untuk membuka daerah terisolir masyarakat di daerah pengunungan mau pun daerah-daera terpencil lainnya. Koneksitas jaringan transportasi merupakan langkah strategis untuk menghubungkan wilayah perdesaan dengan wilayah kecamatan dan ibukota kabupaten, meningkatkan invovasi ketersediaan dan pemenuhan air minum/baku serta meningkatkan sistem ketangguhan penanggulangan bencana.

Misi 7 : *Mengembangkan pembangunan kepariwisataan.*

Misi ini mengandung makna bahwa dengan memiliki keunggulan potensi sumber daya alam yang menawan dan menarik akan dikembangkan sebagai potensi pariwisata. Menjadikan Seram Bagian

Barat sebagai destinasi pariwisata akan membuka ruang untuk membuka keterisoliran wilayah, meningkatkan akses infrastruktur yang berkualitas sehingga dapat menjadi pasar yang baik pada tingkat lokal, regional mau pun nasional. Penataan dan pengembangan pariwisata juga memerlukan tata kelola yang baik dengan melibatkan masyarakat, kelompok penggiat pariwisata serta dukungan investasi sektor swasta.

Misi 8 : *Memberikan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat.*

Misi ini mengandung makna bahwa keberhasilan penciptaan investasi di Seram Bagian Barat sangat ditentukan dengan terciptanya sistem insentif bagi pelaku usaha berupa pemberian kemudahan dalam proses perijinan. Menciptakan iklim usaha yang pro rakyat serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung dan pemerataan investasi untuk pengembangan daerah perdesaan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian kinerja adalah pernyataan komitmen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja yang dijabarkan dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan yang dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga

mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat merujuk pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi arah pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 5 (lima) tahun kedepan. Dari 8 misi yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 - 2022 dan dijabarkan menjadi 9 (sembilan) tujuan dan 18 (delapan belas) sasaran.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019 hanya diprioritaskan pada 18 (delapan belas) sasaran dan 97 (sembilan puluh tujuh) indikator seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembedaan kapasitas pemerintah yang prima	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62
		2.	Opini BPK	WDP
		3.	Nilai akuntabilitas kinerja	C
		4.	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	90%
		5.	Persentase konsistensi perencanaan daerah	100%
		6.	Produk PerdaPerbup yang dihasilkan	15 Perda/Perbup
		7.	Persentase arsip yang tertata baik	57%
2.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparat sipil negara	8.	Persentase kesesuaian tingkat pendidikan formal dengan jabatan struktural	80%
		9.	Tingkat kompetensi aparatur	90%
3.	Mendorong terwujudnya penataan dan pemekaran wilayah secara	10.	Peningkatan status desa administratif	80%
		11.	Jumlah Pembentukan BUMDES	33 BUMDES
		12.	Cakupan Kelompok Binaan PKK	104 Kelompok
		13.	Pemekaran wilayah kecamatan	3

	berjenjang	14.	Cakupan kajian pemekaran wilayah	3
4.	Menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan yang lebih baik	15.	Indeks Kebahagiaan	65
5.	Meningkatnya layanan kehidupan beragama	16.	Indeks Kebahagiaan	72
6.	Menurunnya angka KDRT	17.	Presentasi penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	50%
		18.	Presentasi penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	53,3%
7.	Menurunnya angka penyakit masyarakat (Pekat)	19.	Persentasi penurunan Pekat	30%
		20.	Persentasi partisipasi masyarakat dalam penyalur hak politik	90%
8.	Teraktualisasinya nilai-nilai budaya Pela Gandong dan Masohi srbagai modal sosial pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat	21.	Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketenteraman	30%
		22.	Meningkatnya kegiatan budaya orang basudara (Masohi)	5 kegiatan
9.	Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan	23.	Fasilitas kondisi baik SD/MI	59%
		24.	Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP	56%
		25.	Persentasi kelulusan SD/MI	100%
		26.	Persentasi kelulusan SMP/MTs	100%
		27.	Persentasi Guru berkualifikasi S1/D-IV	91,24%
		28.	Persentasi Guru bersertifikasi	97,8%
		29.	Rata-rata harapan lama bersekolah	8,46%
		30.	Presentase SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B	24%
		31.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	46%

		32.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%
		33.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%
		34.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD	35%
		35.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP	26%
		36.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.96%
		37.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89.53%
		38.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	1,056%
		39.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	1,126%
		40.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.010%
		41.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.025%
		42.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
		43.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
		44.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	85%
		45.	Angka Melanjutka (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	93%
		46.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	96.14%
		47.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	839
		48.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.029
		49.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.050
		50.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	55.41
		51.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100%
		52.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%

		53.	Jumlah Perpustakaan	263 Bh
		54.	Jumlah Kunjungan Perpustakaan/Tahun	70 Kali/Thn
10.	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	55.	Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	1 : 2306,9
		56.	Angka Umur Harapan Hidup	65
		57.	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	4
		58.	Angka Kematian Bayi	7
		59.	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	100%
		60.	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	1 : 425
		61.	Persentase KB Aktif dan Mandiri	45
		62.	Jumlah penduduk yang terlayani KTP	75%
11.	Meningkatnya kinerja koperasi, industri kecil dan usaha mikro.	63.	Presentase koperasi aktif	118%
		64.	Pertumbuhan wirausaha baru	20
		65.	Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha	100%
		66.	Jumlah sentra Industri	3,00
		67.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52
12.	Meningkatnya Produksi Nilai Tambah dan Pemasaran Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan	68.	Produksi hasil pertanian (ton/tahun)	5,9
		69.	Ketersediaan pangan utama	375,17
		70.	Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	78,22
		71.	Nilai tukar nelayan (NTN)	16.682,8
		72.	Produksi hasil perikanan (ton/tahun)	26.176,67
		73.	Produksi hasil perkebunan (ton/tahun)	13,785,57
13.	Menurunnya angka kemiskinan	74.	Persentase penurunan angka miskin	2,46%
		75.	Jumlah PMKS penerima bantuan	530 PMKS
14.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	76.	Persentase panjang jalan kondisi baik	68,46
		77.	Persentase panjang jembatan kondisi baik	42,33

		78.	Cakupan pelayanan air minum	88 %
		79.	Presentase Penataan Kawasan Permukiman	62,40 %
		80.	Persentasi fasilitas dan infrastruktur perhubungan yang baik	21,68 %
		81.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	10.895.926
		82.	Persentasi layanan IT	40
15.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup	83.	Indeks resiko bencana	127
		84.	Jumlah timbulan sampah perhari	35,42
		85.	Timbunan sampah yang tertangani	19,48
16.	Terbukanya isolasi daerah sekaligus menunjang pembangunan potensi kepariwisataan	86.	Jumlah objek pariwisata andalan	8 Objek
		87.	Jumlah kunjungan wisatawan	24.100
		88.	Lama tinggal wisatawan Nusantara	3
		89.	Lama tinggal wisatawan Mancanegara	3,25
		90.	Kegiatan budaya dan pesta adat	7
		91.	Jumlah benda dan situs sejarah yang dilestarikan	21
17.	Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah	92.	Pertumbuhan PDRB	6,87 %
		93.	Persentasi Pertumbuhan Investasi	20 %
		94.	Waktu penyelesaian izin	2 hari
		95.	Angka partisipasi angkatan kerja	72,54 %
		96.	Tingkat pengangguran terbuka	10,50 %
18.	Meningkatnya daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi local	97.	Persentasi produk masyarakat yang masuk pasaran	15 %



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

A. CAPAIAN KINERJA

A.1 Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat

Pengukuran capaian kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada Tahun 2020 dilakukan secara berkala serta telah mendasar pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap), selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (performance improvement). Adapun rumus yang digunakan dalam menentukan tingkat capaian setiap sasaran adalah :

- a. Tingkat capaian positif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realiasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Tingkat capaian negatif

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan capaian sasaran strategis pembangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Sejahtera, Berbudi Pekerti Luhur dan Berbudaya Berbasis Potensi Ekonomi Lokal.

Guna mempermudah interpretasi atas capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir skala nilai peringkat kinerja yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kerja
Berdasarkan Permen PAN - RB Nomor 12 Tahun 2015

No	Rentang Capaian	Katagori Capaian
1.	> 90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	> 80 – 90	Memuaskan
3.	> 70 – 80	Sangat Baik
4.	> 60 – 70	Baik
5.	> 50 – 60	Cukup
6.	> 30 – 50	Kurang
7.	0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan pengukuran kinerja sasaran, dilakukan analisis dan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan tentang keberhasilan atau ketidak berhasilan pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan kondisi sasaran yang diharapkan. Evaluasi juga bertujuan agar dapat diukur dan diketahui tingkat kemajuan

pencapaian realisasi kinerja dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Seram Bagian Barat.

A.2 Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan kepada setiap stakeholders maupun instansi penilai kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah berusaha untuk mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan pembangunan melalui 18 (delapan belas) Sasaran Strategis dan 97 (sembilan puluh tujuh) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020 dengan 138 (seratus tiga puluh delapan) program/kegiatan.

Secara umum Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah memperlihatkan capaian kinerja dan atas sasaran-sasaran strategisnya dengan rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran strategis 78,23% atau berkategori "Sangat Baik". Adapun hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja sasaran strategis untuk menunjang tercapainya Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat pada tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran 1. Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan Serta Pelayanan Publikasi Prinsip Good Governance”** guna mencapai Misi **“Meningkatkan Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel, Inovatif dan Berwibawa”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan yang baik di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Prima.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Baik”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **71,43 %**. Hasil pengukuran Sasaran **“Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima”** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	60	49,49	79,82
2.	Opini BPK	Opini	WDP	WDP	100

3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	C	C	100
4.	Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	%	90	79,65	88,50
5.	Persentase Konsistensi Perencanaan Daerah	%	100	91,15	91,15
6.	Produk Perda yang dihasilkan	Perda	15	6	40
7.	Persentase Arsip Yang Tertata Baik	%	57	0,33	0,60
Rata - Rata (%)					71,43 %

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	52,31 %	94,08 %	49,49 %	82,48 %	49,49	79,82
2.	Opini BPK	TMP	98,17 %	WDP	100 %	WDP	100
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	31,61 (C)	105,4 %	47,52 (C)	105,6 %	C	100

4.	Persentasi Peningkatan Pendapatan Daerah	53,19 %	66,49 %	63,66 %	70,74	79,65	88,50
5.	Persentase Konsistensi Perencanaan Daerah	62,38	83,17	91,15	101,27	91,15	91,15
6.	Produk Perda yang dihasilkan	3 Perda	13,4 %	15 Perda	125 %	6 Perda	40
7.	Persentase Arsip Yang Tertata Baik	2,25 %	39,41 %	0,33 %	0,66 %	0,33	0,60

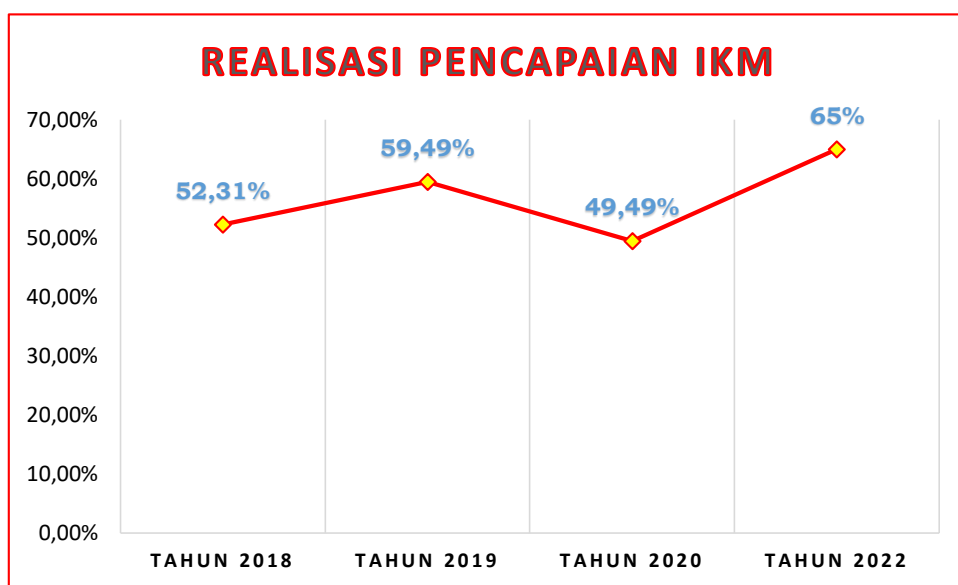
Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatkan Pembinaan Kapasitas Pemerintah Yang Prima Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	52,31 %	59,49 %	49,49 %	65 %
2.	Opini BPK	TMP	WDP	WDP	WTP
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	31,61 (C)	47,52 (C)	C	70 (B)
4.	Persentasi Peningkatan Pendapatan Daerah	53,19 %	53,66	79,65	90 %
5.	Persentase Konsistensi Perencanaan Daerah	62,38	91,15	91,15	100 %
6.	Produk Perda yang dihasilkan	3 Perda	15 Perda	6 Perda	15 Perda
7.	Persentase Arsip Yang Tertata Baik	2,25 %	0,33 %	0,33	65 %

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)”** pada Tahun 2020 adalah sebesar 49,49 % dari target IKM sebesar 62 % yang ditetapkan dengan capaian 79,82 %. Jumlah Presentase pencapaian IKM mengalami Sedikit penurunan di Tahun 2020 sebesar 10 % dibandingkan dengan presentasi pencapaian IKM pada Tahun 2019 dengan 59,49 %.

Grafik 3.1
Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD

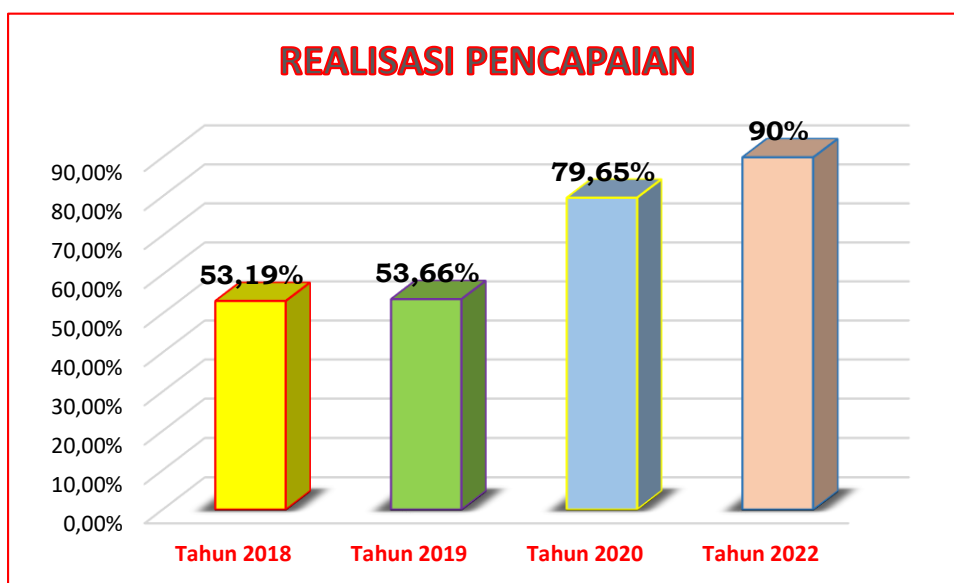


Pada Indikator Kinerja **“Opini BPK”** dengan tujuan terwujudnya akuntabilitas kinerja, keuangan dan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di tahun 2020 berindikasi pada harapan akan meningkatnya kualitas LKPD yang disajikan yaitu memperoleh opini “WDP” dari BPK RI. Hal itu Terbukti pada kenyataannya realisasi yang dihasilkan berstatus “WDP”, di bandingkan dengan tahun sebelumnya, maka status ini tetap sama dan di harapkan target akhir yang diperoleh adalah WTP.

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Nilai Akuntabilitas Kinerja”** pada Tahun 2020 mencapai predikat C, angka ini tetap sama dengan tahun 2019 dalam predikat C. Namun diharapkan pada target akhir mendapat predikat B dengan angka 70-75.

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Presentase Peningkatan Pendapatan Daerah”** pada Tahun 2020 adalah sebesar 79,65 % sebesar 100 %. Pencapaian ini sedikit lebih meningkat di bandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai target sebesar 63,66 %

Grafik 3.2
Realisasi Presentase Peningkatan Pendapatan
di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020
dengan Target Akhir RPJMD



Realisasi dari Indikator Kinerja **“Presentasi Konsistensi Perencanaan daerah”** pada Tahun 2020 adalah sebesar 91,15 % dari target sebesar 100 % yang ditetapkan dengan capaian 91,15 %. Keberhasilan indikator ini didukung oleh beberapa program antara lain : Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Data dan Pelaporan, Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Perencanaan Sosial Budaya serta Pengembangan Wilayah dan Sumberdaya Alam.

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Produk Perda Yang Di Hasilkan”** pada Tahun 2020 adalah sebanyak 6 Peraturan Daerah dari target sebanyak 15 Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan capaian 40%. Jumlah produk Peraturan Daerah yang dihasilkan lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Peningkatan Arsip Yang Tertata Baik”** pada Tahun 2020 mencapai angka 0,33 % dari target 57 %, angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 2,25 %. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor, antara lain : *Pertama* : rendahnya kapasitas Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas, *Kedua* : pada tahun 2019 terdapat kekosongan jabatan esalon, *Ketiga* : Kelembagaan kearsipan dan perpustakaan masih lemah, *Keempat* : Keterbatasan anggaran pembangunan system kearsipan dan *Kelima* : Adanya wabah covid 19, yang mengakibatkan lemahnya anggaran untuk menjawab indikator ini.

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp. 132.182.332.950,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 125.356.993.736,- OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Kearsipan Daerah, Inspektorat daerah, Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan, Badan Perencanaan, Bagian Layanan Pengadaan, Bagian Hukum, dan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa indikator belum terealisasi dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Kurangnya ketersediaan data kinerja dari masing-masing OPD, adanya kesulitan dalam implementasi data-data tersebut;
- 2) Terdapat beberapa indikator kinerja dirasa kurang sesuai RPJMD;
- 3) Terdapat beberapa OPD masih belum menggambarkan kionerja secara utuh;

- 4) Kurangnya tenaga Fungsional Pengawas Internal APIP dan SPIP;
- 5) Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi masih kurang;
- 6) Pengelolaan Penerimaan daerah belum belum berbasis IT.

Upaya-upaya pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi adalah sebagai berikut :

- 1) Menetapkan system e-planing;
- 2) Melakukan Pendataan, Penyuluhan, Monitoring dan Pembinaan secara terus menerus terhadap Wajib Pajak dan Retribusi;
- 3) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan berbasis IT.
- 4) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
- 5) Frekwensi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran **“Meningkatnya Pembenahan Kapasitas Pemerintah Yang Prima”** tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, antara lain : *Pertama* : Pelaksanaan ujian sertifikasi tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, pendidikan dan pelatihan teknis, fasilitasi layanan pengadaan barang/jasa dan penyusunan peraturan kepala daerah tentang pengadaan barang/jasa terlaksana dengan baik dan tanpa hambatan yang berarti, *Kedua* : Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur, *Ketiga* : Adanya peningkatan pelayanan public. Selain itu juga, adanya langkah-langkah kebijakn yang diambil Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat demi mencapai sasaran “Meningkatnya Pembenahan Kapasitas Pemerintah Yang Prima”.

Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur Sipil Negara

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan Serta Pelayanan Publikasi Prinsip Good Governmance”** guna mencapai Misi **“Meningkatkan Miringkatnya tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel, Inovatif dan Berwibawa”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas ASN di lingkup Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Negara, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **52,98 %**. Hasil pengukuran Sasaran **“Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Negara”** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Negara
Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentasi Kesesuaian Tingkat Pendidikan Formal Dengan Jabatan Struktural dan Fungsional	Persen	80	86,69	108,36

2.	Tingkat Kompetensi Aparatur	Persen	90	3,38	3,75
Rata - Rata (%)					52,98 %

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Negara Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentasi Kesesuaian Tingkat Pendidikan Formal Dengan Jabatan Struktural dan Fungsional	128,35	151	96,78	129,04	86,69	108,36
2.	Tingkat Kompetensi Aparatur	37,65	44,29	73,36	81,51	3,38	3,75

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Kapasitas Dan Kualitas Aparat Sipil Negara Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Presentasi Kesesuaian Tingkat Pendidikan Formal Dengan Jabatan Struktural dan Fungsional	128,35	96,78	86,69	95

2.	Tingkat Kompetensi Aparatur	37,65	73,36	3,38	100
----	-----------------------------	-------	-------	------	-----

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Presentasi Kesesuaian Tingkat Pendidikan Formal Dengan Jabatan Struktural dan Fungsional”** dapat digambarkan dalam tabel 3.8

Tabel 3.8
Tingkat Pendidikan Formal dengan Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Essalon II	29 Org	29 Org	100
2.	Essalon III	86 Org	85 Org	98,84
3.	Essalon IV	200 Org	183 Org	91,50
Rata - Rata (%)				96,78 %

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Tingkat Kompetensi Aparatur”** dapat digambarkan dalam tabel 3.9

Tabel 3.9
Tingkat Kompetensi Aparatur

No	Jabatan Struktural	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Essalon II	29 Org	29 Org	100
2.	Essalon III	86 Org	68 Org	79,07
3.	Essalon IV	200 Org	82 Org	41
Rata - Rata (%)				73,36 %

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini awalnya adalah sebesar Rp. 1.186.297.400,- tetapi kemudian terjadi perubahan anggaran sebesar Rp. 1.084.617.668,- OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. SBB dengan jumlah SDM sebanyak 41 ANS yang terdiri dari 23 PNS laki-laki dan 18 PNS perempuan serta Bagian Organisasi Setda Kab. SBB dengan jumlah SDM sebanyak 12 ASN.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran **“Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparat Sipil Negara”** didukung oleh Program pembinaan dan pengembangan aparatur serta Program penataan kelembagaan perangkat daerah yang terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020.

Sasaran 3. Mendorong terwujudnya penataan dan pemekaran wilayah secara berjenjang

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan Serta Pelayanan Publikasi Prinsip Good Governance”** guna mencapai Misi **“Meningkatkan Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Akuntabel, Inovatif dan Berwibawa”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk memetaan wilayah secara berjenjang di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Mapan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **177,28 %**. Hasil

pengukuran Sasaran “Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Capaian Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Peningkatan status desa administratif	Desa	80	0	0
2.	Presentase Pembentukan BUMDES	BUMDes	33	93,47	283,2
3.	Capaian Kelompok Binaan PKK	Kelompok	104	558	536,53
4.	Pemekaran wilayah kecamatan	Wilayah	3	0	0
5.	Cakupan kajian pemekaran wilayah	Kajian	3	2	66,67
Rata - Rata (%)					177,28 %

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang Tahun 2020 dengan Tahun 2017 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Peningkatan status desa administratif	0	0	0	0	0	0

2.	Presentase Pembentukan BUMDES	73 %	91,25 %	85 %	92 %	93,47	283,2
3.	Capaian Kelompok Binaan PKK	88 Kelompok	100 %	203 Kelompok	195 %	558	536,53
4.	Pemekaran wilayah kecamatan	-	-	-	-	0	0
5.	Cakupan kajian pemekaran wilayah	1	100 %	4	133 %	2	66,67

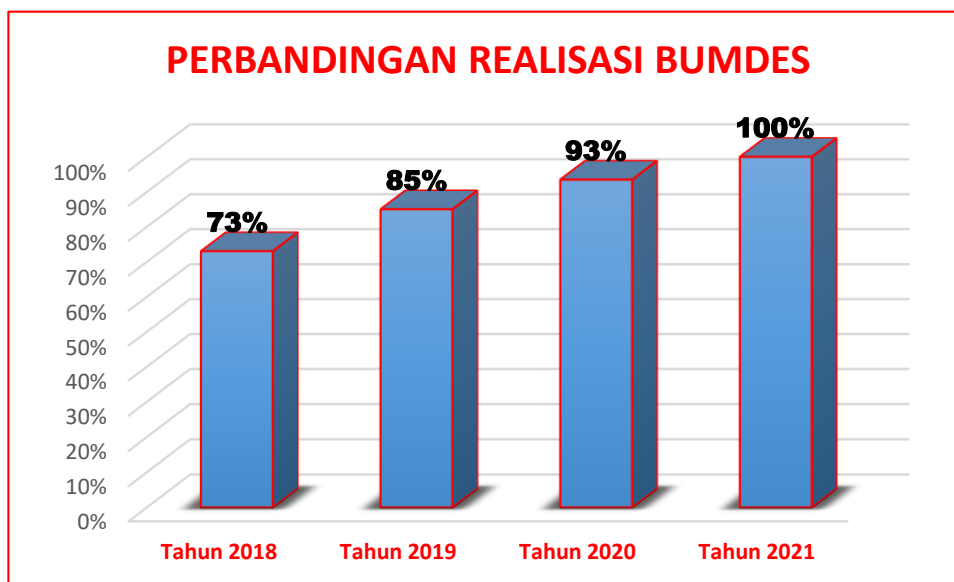
Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Mendorong Terwujudnya Penataan Dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Peningkatan status desa administratif	0	0	0	100
2.	Presentase Pembentukan BUMDES	73 %	85 %	93,47	100
3.	Capaian Kelompok Binaan PKK	88 Kelompok	203 Kelompok	558 Kelompok	104
4.	Pemekaran wilayah kecamatan	-	-	0	-
5.	Cakupan kajian pemekaran wilayah	1	4	2	1

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Peningkatan Status Desa Administratif”** terhadap 16 desa persiapan target 11 Desa persiapan menjadi difinitif belum terealisasi dengan pencapaian 0% akuntabilitas untuk kinerja ini sangat kurang.

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Presentase Pembentukan BUMDes”** pada Tahun 2020 adalah sebesar realisasi 93,47 % dari target 80 % yang ditetapkan. Jumlah Presentase Pembentukan BUMDes mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebanyak 2 BUMDes menjadi 87 BUMDes dibandingkan dengan jumlah BUMDes pada Tahun 2019 dengan jumlah BUMDes 85 BUMDes.

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Pembentukan BUMDes di Kabuoaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD



Realisasi dari Indikator Kinerja **“Cakupan Kelompok Binaan PKK”** pada Tahun 2020 adalah sebesar 558 Kelompok Binaan dari target 104 Kelompok Binaan yang ditetapkan dengan capaian 536 %. Jumlah Presentase

Kelompok Binaan PKK mengalami peningkatan di Tahun 2020 dibandingkan dengan jumlah pada Tahun 2019 dengan jumlah 203 Kelompok Binaan.

Realisasi dari indikator Kinerja **“Pemekaran Wilayah Kecamatan”** pada tahun 2020 tidak terrealisasi, dari target yang diharapkan yaitu sebanyak 3 wilayah pemekaran kecamatan.

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Cakupan Kajian Pemekaran Wilayah”** pada Tahun 2020 adalah 2 (dua) kajian terhadap wilayah kecamatan dari target 2 kajian yang ditetapkan. Hal ini karena 1 (satu) kajian wilayah telah dilaksanakan di tahun 2019 yaitu Jumlah kajian meliputi Kajian Wilayah Kecamatan Seram Barat, Kecamatan Taniwel, Kecamatan Huamual serta Kecamatan Huamual Belakang/Waisala. Upaya Yang Dilakukan Oleh Badan Penelitian dan Pengembangan untuk meningkatkan kinerja Cakupan Kajian Pemekaran Wilayah adalah dengan melakukan kegiatan kajian pembentukan pemekaran wilayah, kegiatan dimaksudkan untuk pembentukan daerah otonomi baru.

Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi Cakupan Kelompok Binaan PKK
di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD



Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp. 7.096.171.595,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.615.762.665,- OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan jumlah SDM 37 PNS yang terdiri dari 26 PNS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan 11 PNS dari Badan Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini sudah sangat baik, namun masih terdapat beberapa indikator belum terealisasi dengan sangat memuaskan. Namun ada beberapa kendala yang mengakibatkan beberapa indikator kinerja tidak tercapai secara maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- 1) Upaya peningkatan Status dusun menjadi desa/negeri belum tertata secara efektif disebabkan masih disesuaikan dengan adat istiadat lokal;
- 2) Masih terdapat persoalan-persoalan internal antara pejabat kepala desa/raja dengan perangkat didalam desa/negeri yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa/negeri tidak terlaksana dengan baik diantaranya terdapat desa/negeri yang tidak transparansi mengelola dana ADD tahun 2020 secara menyeluruh.
- 3) Tidak adanya proses pemekaran kecamatan, seperti yang ditargetkan.

Upaya-upaya pemecahan terhadap permasalahan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya intervensi program dan kegiatan pemberdayaan dalam rangka membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja dengan tujuan mengurangi pengangguran dan menekan tingkat kemiskinan.
- 2) Mendayagunakan sumber-sumber daya alam yang dimiliki masyarakat dengan memanfaatkan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

- 3) Meningkatkan kapasitas tugas dan fungsi aparat pemerintah Negeri/Desa dan kelembagaan Negeri/Desa melalui pelatihan-pelatihan atau pemagangan/ bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan khususnya Implementasi Peraturan Daerah tentang Negeri/Desa dan peraturan turunannya demi terselenggaranya penataan penyelenggaraan pemerintahan Negeri/Desa, pelayanan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan.
- 4) Frekwensi monitoring, evaluasi, pendampingan dan pengawasan serta pembinaan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.

Keberhasilan dalam mencapai sasaran ***“Mendorong Terwujudnya Penataan dan Pemekaran Wilayah Secara Berjenjang”*** tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sehingga semua desa disetiap kecamatan dalam Kabupaten Seram Bagian Barat yang telah terbentuk kelompok PKK, melaksanakan 10 (sepuluh) program PKK, dalam implementasi 4 (empat) pokja, masing-masing pokja Keagamaan dan Gotong royong, Pokja Pendidikan, Pokja Sandang Pangan dan Pokja Kesehatan, dengan kegiatan Binaan meliputi, Pos Yandu, Kelompok Dasa Wisma, UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, TK dan PAUD Binaan TIM PKK, Lomba Cipta Menu LP2CM, selain itu juga terjadi Peningkatan Badan Usaha Milik Desa pada 11 Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sasaran 4.

Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan ***“Terciptanya Toleransi Dengan Kekeluarga Dalam Kehidupan Beragama”*** guna mencapai Misi ***“Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama (Inter, Antar dan Umat Beragama Dengan Pemerintah)”***.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar untuk menciptakan kerukunan beragama yang lebih baik di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta Suasana Kehidupan Beragama.

Pada sasaran ini hanya terdapat 1 (satu) Indikator yaitu “*Indeks Kebahagiaan*” dan berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat “**Sangat Memuaskan**” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **95 %**. Hasil pengukuran Sasaran “Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik”

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kebahagiaan	%	65	61,75	95
Rata - Rata (%)					95 %

Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kebahagiaan	54,62 %	91,04 %	45,17 %	72,86 %	61,75%	95%

Tabel 3.15
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menciptakan Praktek Kehidupan
Agama dan Kerukunan Yang Lebih Baik Tahun 2020
dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Indeks Kebahagiaan	54,62 %	45,17 %	61,75	72 %

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Indeks Kebahagiaan”** pada tahun 2020 dari target 65% sebesar 61,75% dengan pencapaian 95%. Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp. 1.754.628.800,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.699.675.000,- OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah. Berdasarkan hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini sudah sangat baik, namun masih terdapat kendala, antara lain:

- 1) Terbatasnya aparatur yang profesional;
- 2) Adanya wabah covid 19, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan indikator ini.

Sasaran 5. Meningkatkan Layanan Kehidupan Beragama

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Terciptanya Toleransi Dengan Keluarga Dalam Kehidupan Beragama”** guna mencapai Misi **“Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama (Inter, Antar dan Umat Beragama Dengan Pemerintah)”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar untuk menciptakan kerukunan beragama yang lebih baik di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta Suasana Kehidupan Beragama.

Seperti halnya sasaran ke 4 (empat), pada sasaran ini juga hanya terdapat 1 (satu) Indikator yaitu “*Indeks Kebahagiaan*” dan berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat “**Sangat Memuaskan**” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **95 %**. Hasil pengukuran Sasaran “Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama”

Tabel 3.16
Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Kebahagiaan	%	72	68,8	95
Rata - Rata (%)					95 %

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Kebahagiaan	69 %	100 %	71 %	99,05 %	68,8	95

Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya Layanan Kehidupan Beragama Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Indeks Kebahagiaan	69 %	71 %	68,8	74 %

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Indeks Kebahagiaan”** pada tahun 2020 dari target 71% sebesar 68,8% dengan capaian sebesar 95%. Keberhasilan indikator ini didukung oleh program yang sama dengan sasaran ke 4 (empat) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di tahun 2020.

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp. 164.614.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 159.619.000,- OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Sasaran 6. Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Terciptanya toleransi dengan suasana keluarga dalam kehidupan agama”** guna mencapai Misi **“Meningkatkan kerukunan antar umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah)”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta kualitas hubungan antar masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Kurang”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **0 %**. Hasil pengukuran Sasaran “Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.20
Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Penurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	%	50	0	0
2.	Persentase Penurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	%	53,3	0	0
Rata - Rata (%)					0

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Persentase Penurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0	0	0	0	0	0
2.	Persentase Penurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0	0	0	0	0	0

Tabel 3.21
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Persentase Penurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak	0	0	0	57,14
2.	Persentase Penurunnya Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	0	0	0	58,82

Realisasi indikator kerja dari sasaran “Menurunnya Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga” dengan pencapaian rata – rata 0 %. Pada tahun ini dan

tahun-tahun sebelumnya, angka kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diukur karena adanya faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan indikator ini adalah skala prioritas kegiatan namun minimnya penganggaran untuk mengukur indikator-indikator tersebut serta adanya wabah covid 19 yang mengakibatkan adanya perubahan anggaran untuk menjawab sasaran tersebut.

Kebijakan yang dilakukan untuk menempatkan pimpinan OPD sesuai dengan hasil lelang jabatan dan kompetensi pada OPD terkait.

Adapun beberapa program pendukung antara lain : *Pertama* : Program keluarga berencana, yang dianggarkan sebesar Rp. 4.991.019.400,- dengan terrealisasi sebesar Rp. 4.552.162.100,- *Kedua* : Program Kesehatan Reproduksi Remaja yang dianggarkan sebesar Rp. 49.025.000,- dengan terrealisasi sebesar Rp. 48.425.000,- *Ketiga* : Program Pembinaan Peran Rerta Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri yang dianggarkan sebesar Rp. 28.661.800,- dengan terrealisasi sebesar Rp. 28.436.800,-

Sasaran 7. Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Terciptanya toleransi dengan suasana kekeluarga dalam kehidupan agama”** guna mencapai Misi **“Meningkatkan kerukunan antar umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah)”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin rasa aman dan damai dalam kehidupan bermasyarakat khususnya terkait penyakit masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta kualitas hubungan antar masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT), dapat disimpulkan bahwa capaian

sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Kurang”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **0 %**. Hasil pengukuran Sasaran “Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT)” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.22
Capaian Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT)
Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentasi penurunan Pekat	%	30	0	0
2.	Persentasi partisipasi masyarakat dalam penyalur hak politik	%	90	0	0
Rata - Rata (%)					0 %

Tabel 3.23
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2020 dengan Tahun 2018 – 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentasi penurunan Pekat	-	-	0 %	0 %	0	0
2.	Persentasi partisipasi masyarakat dalam penyalur hak politik	80,20 %	89.11 %	80,20 %	89.11 %	0	0

Tabel 3.24
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Presentasi penurunan Pekat	-	-	0 %	40 %
2.	Persentasi partisipasi masyarakat dalam penyalur hak politik	80,20 %	80,20 %	0 %	80,35 %

Realisasi indikator kerja dari sasaran “Menurunnya Angka Penyakit Masyarakat (PEKAT)” dengan pencapaian rata – rata 0 % sangat kurang memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain penganggaran untuk program penurunan pekat pada tahun ini minimnya penganggaran untuk mengukur indikator-indikator tersebut serta pada tahun 2020 adanya wabah covid 19 dan tidak adanya proses penyaluran hak politik dalam Kab. Seram Bagian Barat. Namun ada beberapa program yang dijalankan untuk menopang sasaran ini yaitu

Pertama : Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan,

Kegiatan pada program ini berupa : Patroli keamanan dan kenyamanan lingkungan (hanya dilakukan pada hari-hari tertentu)

Kedua : Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal,

Kegiatan pada program ini berupa :

- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)
- b. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
- c. Monitoring Kondisi Keamanan dan Ketertiban

Ketiga : Program pendidikan politik masyarakat, dimana pada program ini hanya terdapat kegiatan Tim Verifikasik Dana Bantuan Partai Politik

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp. 1.330.654.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.265.660.000,- OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Satuan Pamong Praja (Satpo PP) dan Badan Kesatuan Bangsa and politik.

Sasaran 8. Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan ***“Melembagakan Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Dalam Kehidupan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat”*** guna mencapai Misi ***“Meningkatkan kerukunan antar umat beragama (inter, antar dan umat beragama dengan pemerintah)”***.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk menerapkan nilai-nilai budaya Pela Gandong dan Masohi di Kabupaten Seram Bagian Barat sehingga tercipta sosial pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Barat yang lebih baik.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Baik”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **66,67 %**.

Hasil pengukuran Sasaran “Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25
Capaian Sasaran Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi
Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketentraman	%	30	20	66,67
2.	Meningkatnya kegiatan budaya orang basudara (Masohi)	%	5	0	0
Rata - Rata (%)					66,67 %

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya
Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram
Bagian Barat Tahun 2020 dengan Tahun 2017 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketentraman	22	100 %	20	80 %	20	66,67
2.	Meningkatnya kegiatan budaya orang basudara (Masohi)	2	40 %	2	40 %	0	0

Tabel 3.27

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Teraktualisasinya Nilai-Nilai Budaya Pela Gandong Dan Masohi Sebagai Modal Sosial Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Terpeliharanya Kondisi Keamanan Dan Ketentraman	22	20	20	32
2.	Meningkatnya Kegiatan Budaya Orang Basudara (Masohi)	2	2	0	5

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Terpeliharanya Kondisi Keamanan dan Ketentraman”** pada Tahun 2020 mencapai angka 20 dari target 30, angka ini seimbang dengan tahun 2019 yaitu sebesar 20. Hal ini disebabkan oleh kondisi keamanan dan ketentraman yang selalu kondusif di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Realisasi dari Indikator Kinerja **“Meningkatnya Kegiatan Budaya Orang Basudara”** pada Tahun 2020 tidak terealisasi dari target 5, Hal ini disebabkan oleh adanya wabah covid 19, yang mengakibatkan tidak boleh adanya kerumunan masyarakat, makanya tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Satuan Pamong Praja (Satpo PP) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran 9.

Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Keterjaminan, Pelayanan Pendidikan.

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Menuju Rakyat Seram Bagian Barat Yang Cerdas Dan Berkualitas”** guna mencapai Misi **“Pengembangan Bidang Pendidikan”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan sehingga tercipta masyarakat Seram Bagian Barat Yang Cerdas dan Berkualitas.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Keterjaminan, Pelayanan Pendidikan, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Baik”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **78,28 %**. Sasaran ini memiliki 32 Indikator, dan merupakan sasaran dengan indikator terbanyak. Hasil pengukuran Sasaran “Meningkatnya Pemerataan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan, dan Keterjaminan, Pelayanan Pendidikan” dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.28
Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Fasilitas kondisi baik SD/MI	%	59	50,92	86%
2.	Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP	%	56	28	51%
3.	Persentasi kelulusan SD/MI	%	100	100	100,00%
4.	Persentasi kelulusan SMP/MTs	%	100	100	100,00%
5.	Persentasi Guru berkualifikasi S1/D-IV	%	91,94	59,50	65,21%

6.	Persentasi Guru bersertifikasi	Guru	978	795	84%
7.	Rata-rata harapan lama bersekolah	Tahun	8,46	8,45	99,88%
8.	Presentase SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	24	61%	255%
9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	46	64,64%	141%
10.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	%	100	97%	97%
11.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100	79%	79%
12.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD	%	35	16,91%	48%
13.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP	%	26	11,48%	44%
14.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	98,96	77,00%	78%
15.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	89,53	55,96%	62%
16.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	1,056	777,79	74%
17.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	1,126	686,41	61%
18.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,010	0,71	1,41%
19.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,025	0,71	3,50%

20.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100%
21.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100%
22.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	%	85	71	84%
23.	Angka Melanjutka (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	93	106	114%
24.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	96,14	76,67	80%
25.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	839	916	109,14%
26.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,029	0,06	46%
27.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,050	0,23	22%
28.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	55,41	14,81	27%
29.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	%	100	100	100%
30.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	%	100	99	99%

31.	Jumlah Perpustakaan	Unit	263	246	94%
32.	Jumlah Kunjungan Perpustakaan/Tahun	Kali/Thn	70	0	0
Rata - Rata (%)					78,28 %

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Tahun 2020 dengan Tahun 2019 - 2020

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Fasilitas kondisi baik SD/MI	38,98	90,65%	51	100%	50,92	86%
2.	Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP	27,61	76,69%	35	77%	28	51%
3.	Persentasi kelulusan SD/MI	100,00	100,00%	100	100%	100	100,00%
4.	Persentasi kelulusan SMP/MTs	100,00	100,00%	100	100%	100	100,00%
5.	Persentasi Guru berkualifikasi S1/D-IV	68,00	82,44%	79,10	89%	59,50	65,21%
6.	Persentasi Guru bersertifikasi	920,00	96,03%	812	84%	795	84%
7.	Rata-rata harapan lama bersekolah	8,47	100,36%	8,45	100%	8,45	99,88%
8.	Presentase SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B	43,00	330,77%	64%	336,8%	61%	255%

9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	16,00	48,48%	18,95	49%	64,64%	141%
10.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,00	108,00%	105	105%	97%	97%
11.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	99,91	99,91%	103	103%	79%	79%
12.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD	29,16	94,06%	27,78%	84%	16,91%	48%
13.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP	16,64	75,64%	20,40%	85%	11,48%	44%
14.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	82,45	83,34%	91,58%	85%	77,00%	78%
15.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	59,90	0,67%	72,71%	81%	55,96%	62%
16.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	824,47	74,14%	915,79	84%	777,79	74%
17.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	598,98	47,80%	727,08	61%	686,41	61%
18.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,29	152,63%	0,0035%	25%	0,71	1,41%
19.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,76	152%	0,0000%	0%	0,71	3,50%

20.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100%	100%	100%	100	100%
21.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100%	100%	100%	100	100%
22.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	94,98	126,64%	94,36%	118%	71	84%
23.	Angka Melanjutka (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88,65	97,42%	82%	89%	106	114%
24.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	83,13	90,07%	84,95	90%	76,67	80%
25.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	838,43	102,37%	858	103,49%	916	109,14%
26.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,06	222,22%	0,06	46%	0,06	46%
27.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,18	382,98%	0,19	26%	0,23	22%
28.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	16,71	46,66%	17,63	39%	14,81	27%

29.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,39	99,39%	100%	100%	100	100%
30.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,39	99,39%	99%	99%	99	99%
31.	Jumlah Perpustakaan	158,00	74,53%	176	72%	246	94%
32.	Jumlah Kunjungan Perpustakaan/ Tahun	-	-	0	0	0	0

Tabel 3.30

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Fasilitas kondisi baik SD/MI	38,98	51	50,92	75
2.	Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP	27,61	35	28	75
3.	Persentasi kelulusan SD/MI	100,00	100	100	100
4.	Persentasi kelulusan SMP/MTs	100,00	100	100	100
5.	Persentasi Guru berkualifikasi S1/D-IV	68,00	79,10	59,50	100
6.	Persentasi Guru bersertifikasi	920,00	812	795	998
7.	Rata-rata harapan lama bersekolah	8,47	8,45	8,45	8,48

8.	Presentase SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B	43,00	64%	61%	34
9.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	16,00	18,95	64,64%	60
10.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	108,00	105	97%	100
11.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	99,91	103	79%	100
12.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SD	29,16	27,78%	16,91%	39
13.	Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP	16,64	20,40%	11,48%	30
14.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	82,45	91,58%	77,00%	99.00
15.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	59,90	72,71%	55,96%	90.00
16.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	824,47	915,79	777,79	1,000
17.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	598,98	727,08	686,41	1,000
18.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,29	0,0035%	0,71	0.000
19.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,76	0,0000%	0,71	0.000
20.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100%	100	100
21.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	100%	100	100
22.	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	94,98	94,36%	71	95
23.	Angka Melanjutka (AM) SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	88,65	82%	106	95
24.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	83,13	84,95	76,67	100.00
25.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	838,43	858	916	860
26.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,06	0,06	0,06	0.032
27.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,18	0,19	0,23	0.053

28.	Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	16,71	17,63	14,81	75.00
29.	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	99,39	100%	100	100.00
30.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,39	99%	99	100.00
31.	Jumlah Perpustakaan	158,00	176	246	316
32.	Jumlah Kunjungan Perpustakaan/Tahun	-	0	0	80

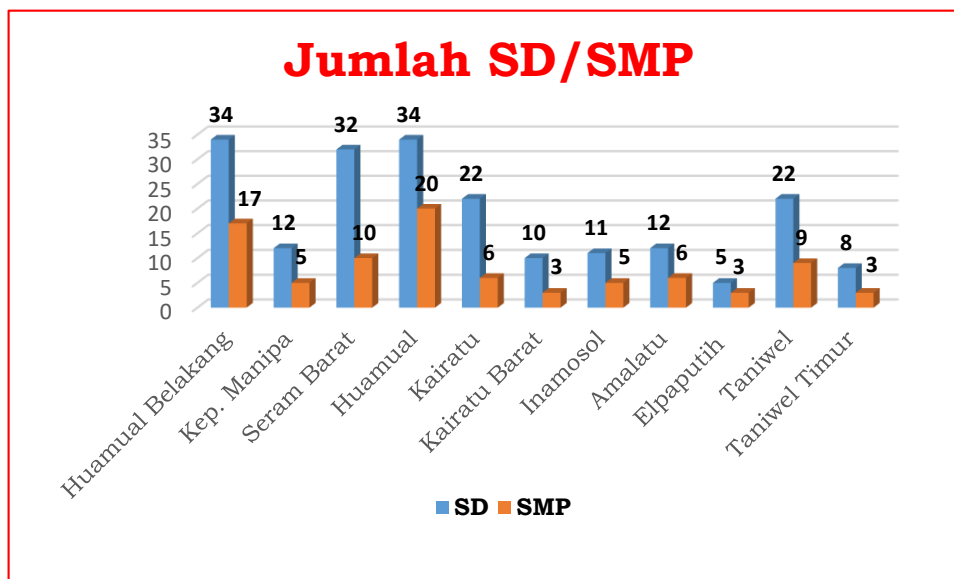
Realisasi dari indicator kinerja **“Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SD/M”** tahun 2020 yang dapat di capai sebesar 50,92% atau tingkat capaian kinerja terhadap indicator kinerja ini mencapai 86% atau termasuk dalam kriteria target kinerja memuaskan. Penyebab utama sehingga target kinerja ini dalam kategori memuaskan adalah karena Anggaran pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas SD yang rusak di tahun 2020 baik dengan pembiayaan DAK Bidang Pendidikan Maupun DAU.

Realisasi dari indicator kinerja **“Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP”** tahun 2020 adalah 28,32%, dari target sebesar 56% atau tingkat capaian kinerja terhadap indicator kinerja ini hanya mencapai 51% atau termasuk dalam kriteria target kinerja yang cukup. Penyebab utama sehingga target kinerja ini dalam kategori baik adalah karena di tahun 2020 alokasi anggaran untuk Pembangunan maupun rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP yang bersumber dari DAK turun.

Target pada indicator kinerja **“Persentasi Kelulusan SD/MI”** Tahun 2020 adalah 100%, dan realisasi yang dapat di capai 100% atau tingkat capaian kinerja terhadap indicator kinerja ini mencapai 100% atau termasuk dalam kriteria target kinerja yang Sangat Memuaskan, dimana dengan jumlah

peserta USNB SD/MI Tahun Ajaran 2019/2020 berjumlah 4.179 siswa semuanya dinyatakan lulus.

Grafik 3.5
Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Per Kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Barat



Realisasi dari indikator kinerja **“Persentasi Kelulusan SMP/MTs”** Tahun 2020 adalah 100%, dan realisasi yang dapat di capai 100% atau tingkat capaian kinerja terhadap indikator kinerja ini mencapai 100% atau termasuk dalam kriteria target kinerja yang Sangat Memuaskan, dimana dengan jumlah peserta UN SMP/MTs Tahun Ajaran 2019/2020 berjumlah 3.922 siswa semuanya dinyatakan lulus.

Realisasi dari indikator kinerja **“Persentasi Guru Berkualifikasi S1/D-IV”** tahun 2020 di capai 59,50% atau tingkat capaian kinerja terhadap indikator kinerja ini mencapai 65,21% atau termasuk dalam kriteria target kinerja baik. Hal ini berarti masih ada 20,90% guru atau 945 Guru PAUD/SD/MI/SMP/MTs di Kabupaten ini yang masih belum memenuhi standar Kualifikasi S-1 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dari

jumlah Guru PAUD/SD/MI/SMP/MTs 3.826 orang. Pemenuhan target yang belum tercapai tersebut diatas, sangat bergantung kepada Anggaran Daerah yang tersedia maupun Anggaran Pusat serta keinginan dan kemauan Individu Guru untuk bisa berkualifikasi S-1 dengan biaya sendiri. Hal ini berarti masih ada 34.79% guru atau 1.765 Guru PAUD/SD/MI/SMP/MTs di Kabupaten ini yang masih belum memenuhi standar Kualifikasi S-1 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dari jumlah Guru PAUD/SD/MI/SMP/MTs 4.026 orang. Pemenuhan target yang belum tercapai tersebut diatas, sangat bergantung kepada Anggaran Daerah yang tersedia maupun Anggaran Pusat serta keinginan dan kemauan Individu Guru untuk bisa berkualifikasi S-1 dengan biaya sendiri.

Target dari indicator kinerja **“Persentasi Guru Bersertifikasi”** di tahun 2020 adalah 978 Guru bersertifikasi dan realisasi di tahun 2020 adalah terdapat 795 orang guru yang bersertifikasi dan ini belum termasuk dengan data guru Bersertifikat yang bekerja di sekolah wilayah Kemenag. Dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 84% dengan kategori kriteria target kinerja adalah Memuaskan.

Realisasi dari indicator kinerja **“Rata-Rata Harapan lama Bersekolah”** di tahun 2020 adalah 8.45 angka rata-rata Harapan lama sekolah atau dengan kata lain siswa kita masih baru menjang pendididkan pada kelas 8 atau kelas 2 SMP. Dan dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 99.88 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat tinggi. Pekerjaan kita yang utama adalah menuntaskan siswa-siswa kita sehingga belajar bisa sampai tuntas pada kelas 12 SMA/MA/SMK dan hal ini butuh perhatian serius dari semua pihak baik itu Pemerintah daerah, maupun masyarakat didalam menuntaskan angka putus sekolah di masyarakat.

Realisasi dari indicator kinerja **“Presentase SD/MI, SMP/MTs Berakreditasi Minimal B”** di tahun 2020 adalah sebesar 61% SD/MI dan SMP/MTs Berkreditasi B atau sebanyak 179 SD dan SMP dari jumlah SD dan SMP sebanyak 293 Sekolah, Dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah

sebesar 225% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Realisasi dari indikator kinerja **“Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD”** di tahun 2020 adalah sebesar 64,64% ,dengan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 141% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Angka realisasi tersebut dapat naik dengan masuknya data siswa RA Tahun 2020.

Realisasi pada indikator **“Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A”** dimana Target pada indikator kinerja ini adalah 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 97% ,dengan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 97%. Dimana berdasarkan data Jumlah siswa SD/MI/SLB/Paket A berjumlah 27.407 orang dengan penduduk usia sekolah 7-12 tahun berjumlah 21.729 orang atau dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat tinggi dan tingginya angka tersebut diatas menunjukkan bahwa siswa jenjang SD/MI/Paket A melebihi dari Penduduk Usia Sekolah yang berumur 7-12 Tahun.

Realisasi pada indikator **“Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B”** dimana Target pada indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B ini adalah 100% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 79%, dengan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 79% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat baik. Dimana berdasarkan data jumlah siswa SMP/MTs/SLB/Paket B adalah 12.661 orang sedangkan penduduk usia 13-15 Tahun berjumlah 8.936 orang

Realisasi pada indikator **“Angka Pendidikan yang ditamatkan SD”** dimana Target pada indikator kinerja ini adalah 35% dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 16,71% ,dengan capaian kinerja pada indikator ini adalah sebesar 48% dengan kategori kriteria target kinerja adalah kurang baik. Angka Pendidikan yang ditamatkan untuk Jenjang SD adalah 35.547 penduduk dengan jumlah penduduk di tahun 2019 berdasarkan data SBB dalam Angka 2020 dengan jumlah penduduk 210.167 jiwa.

Realisasi pada indikator **“Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 26% dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 11,48% ,dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 44% dengan kategori kriteria target kinerja adalah kurang memuaskan. Angka Pendidikan yang ditamatkan untuk Jenjang SMP adalah 24.131 penduduk dengan jumlah penduduk di tahun 2020 berdasarkan data SBB dalam Angka 2020 dengan jumlah penduduk 210.167 jiwa.

Realisasi pada indikator **“Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 98.96% dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 77,00% ,dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 78% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat baik. Karena ada penambahan siswa yang kecil SLB dan Paket A berusia 7 – 12 Tahun sebanyak 2 orang sehingga total siswa SD/MI /SLB/Paket A berjumlah 21.731 berbanding jumlah penduduk usia sekolah 7-12 Tahun sebanyak 28.221 jiwa.

Realisasi pada indikator **“Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 89.53% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 55,88% ,dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 62% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik. ada perbedaan Angka Perolehan APM SMP/MTS /SLB/Paket B dengan karena ada penambahan siswa SLB berusia 13-15 Tahun sedikit sebanyak 13 orang sehingga total siswa SMP/MTS/SLB/Paket B berjumlah 8.949 berbanding jumlah penduduk usia sekolah 13-15 Tahun sebanyak 15.992 jiwa.

Realisasi pada indikator **“Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 1.056 dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 777,37 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 74% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

sebesar 777,79 berarti ada 777 atau 778 penduduk penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan per 1000 jiwa.

Realisasi pada indikator **“Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 1.126 dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 685,59 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 61% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B sebesar 685.59 yang berarti ada 685 atau 686 Penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah di seluruh jenjang pendidikan per 1000 jiwa.

Realisasi pada indikator **“Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 0.010% dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 0.71% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 1,41% dengan kategori kriteria target kinerja adalah rendah dan ini dinilai baik karena Angka Putus sekolah pada tahun 2019 untuk jenjang SD adalah hanya sebanyak 198 siswa dibagi dengan jumlah siswa SD/MI di tahun Ajaran 2019/2020 adalah 27.407 orang dan data siswa putus sekolah untuk jenjang MI tidak dapat disajikan karena data tidak tersedia.

Realisasi pada indikator **“Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 0,025% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 0,71 % dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 3,50% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat kurang. Angka Putus sekolah pada tahun 2020 untuk jenjang SMP adalah 95 siswa dan MTS tidak dapat disajikan karena data tidak tersedia dan dibagi dengan jumlah siswa SMP/MTs di tahun Ajaran 2018/2019 adalah 12.661 orang.

Realisasi pada indikator **“Angka Kelulusan (AL) SD/M”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 100% dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 100% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2020 adalah sebanyak 100% atau dengan kata lain 4.179 peserta Ujian SD/MI semuanya lulus.

Realisasi pada indikator **“Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 100% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 100% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2020 adalah sebanyak 100% atau dengan kata lain 3.922 peserta Ujian SMP/MTs semuanya lulus.

Realisasi pada indikator **“Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 85% dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 71% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 84% dengan kategori kriteria target kinerja adalah memuaskan. Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2020 adalah sebanyak 84% yang berarti bahwa dari 4.179 lulusan SD/MI di tahun ajaran 2019/2020 hanya 2.980 siswa lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs di Kabupaten sedangkan 1.199 siswa lulusan SD/MI tidak diketahui apakah mereka putus sekolah atau melanjutkan sekolah di luar kab. Seram Bagian Barat.

Realisasi pada indikator **“Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 93% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 106% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 114% dengan kategori kriteria target kinerja adalah memuaskan. Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK pada tahun 2020 adalah sebanyak 106% yang berarti bahwa dari 3.922 lulusan SMP/MTs di tahun ajaran 2019/2020 hanya 3.922 siswa lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK di Kabupaten sedangkan sisanya siswa lulusan MTs melanjutkan sekolah di Kabupaten dan siswa luar kabupaten yang bersekolah di Kabupaten.

Realisasi pada indikator **“Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 96,14% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 76,67% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 80% dengan kategori kriteria target kinerja adalah memuaskan. Angka realisasi sebesar 84,95% berarti

tersedianya minimal 84 SD/MI/SMP/MTs untuk dapat melayani 10.000 penduduk usia sekolah jenjang Pendidikan Dasar.

Realisasi pada indikator **“Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 839 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 916 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 109,14% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Angka realisasi sebesar 109.14% berarti ketersediaan minimal 916 Guru Pendidikan Dasar untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs untuk dapat mengajar 10.000 siswa SD/MI/SMP/MTs.

Realisasi pada indikator **“Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 0.029 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 0,06 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 46% dengan kategori kriteria target kinerja adalah kurang. Angka realisasi sebesar 0.06 berarti rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang SD adalah 60 guru per 1000 siswa.

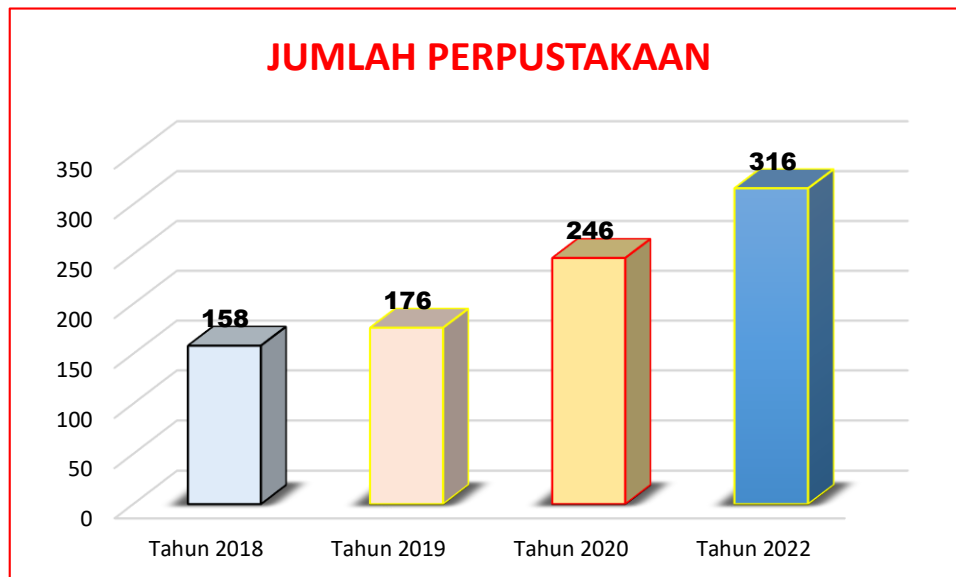
Realisasi pada indikator **“Rasio guru/murid per kelas rata-rata SMP”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 0.05 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 0.23 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 22% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat kurang. Angka realisasi sebesar 0.23 berarti rasio guru/murid per kelas rata-rata jenjang SMP adalah 230 guru per 1000 siswa

Realisasi pada indikator **“Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 55,41 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 14,81 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 27% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat kurang. Angka capaian ini merupakan angka capaian kinerja minimal karena bilangan pembaginya adalah penduduk berusia 12 tahun sedangkan data yang dapat disajikan hanya dalam range penduduk usia 7-12 tahun dan penduduk usia 12 tahun sendiri tidak dapat kami sajikan karena tidak ada data yang spesifik dan kedepannya akan kami koordinasikan dengan pihak terkait untuk dapat menyajikan data tersebut

Realisasi pada indikator **“Angka melek huruf penduduk usia 15 - 24 tahun, perempuan dan laki - laki”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 100% dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 100% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Angka capaian ini merupakan angka capaian yang disesuaikan dengan angka penduduk usia >15 Tahun melek huruf karena data spesifik dalam indicator ini dapat disajikan oleh BPS.

Realisasi pada indikator **“Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 100% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 99% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 99% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Dari angka realisasi diatas yang bersumber dari BPS Kab. Seram bagian Barat dapat diartikan bahwa secara statistic ada sejumlah 1% penduduk di Kab. Seram Bagian Barat yang buta aksara.

Grafik 3.6
Perbandingan Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD



Realisasi pada indikator **“Jumlah Perpustakaan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 263 Perpustakaan dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 246 Perpustakaan dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 94% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat baik. Factor utama tidak tercapainya target 263 perpustakaan sekolah minimnya anggaran daerah untuk dapat membangun Perpustakaan Sekolah.

Realisasi pada indikator **“Jumlah Kunjungan Perpustakaan/Tahun”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 70 kunjungan/tahun dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah 0 kunjungan sehingga capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 0% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat kurang. Factor utama tidak tercapainya target 70 Kunjungan ke Perpustakaan Sekolah adalah tidak adanya data terkait dengan data kunjungan ke Perpustakaan sekolah walaupun kenyataan dilapangan ada banyak kunjungan ke perpustakaan sekolah dan untuk menyelesaikan indicator ini kedepannya akan dilakukan pendataan dan pengelolaan data kunjungan perpustakaan sekolah yang baik.

Keberhasilan maupun kekurangan capaian terhadap indikator-indikator sebagai telah dianalisa sebelumnya tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran keuangan. Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp. 118.780.934.469,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 66.016.361.903,- OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat. Sasaran strategis ini mencapai hasil yang memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Kondisi Ruang Belajar siswa ditingkat SD/MI dan SMP/MTS yang memenuhi standar belajar;
- 2) Peningkatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan Tahun yang semakin terarah;

- 3) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan baik SD/MI dan SMP/MTS;
- 4) Perimbangan Tenaga Kependidikan disemua kecamatan yang mulai tertata kearah yang lebih baik.

Sasaran 10. Meningkatnya Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “**Menuju Rakyat Seram Bagian Barat Yang Sehat Jasmani dan Rohani**” guna mencapai Misi “**Pengembangan Pelayanan Kesehatan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas**”.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat yang sehat jasmani dan berkualitas di kabupaten Seram Bagian Barat.

Pada sasaran ini hanya terdapat 8 (delapan) Indikator dan berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat “**Sangat Memuaskan**” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **96,46 %**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat” dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2019

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	%	1 : 2.306,9	1 : 2.445	106

2.	Angka Umur Harapan Hidup		65	85	130
3.	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	Jiwa	4	6	50
4.	Angka Kematian Bayi	Jiwa	7	7	100
5.	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	%	100	100	100
6.	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	%	1 : 425	1 ; 225	52,9
7.	Presentasi KB Aktif dan Mandiri	%	45	56	124,44
8.	Presentase Penduduk yang terlayani KTP	Jiwa	75	81,3	108,4
Rata - Rata (%)					96,46 %

Tabel 3.33
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	1:2932,5	94.3	1:2932,5	112,48	1 : 2.445	106
2.	Angka Umur Harapan Hidup	60	92,32	65	100	85	130

3.	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	5	116	4	120	6	50
4.	Angka Kematian Bayi	3	166	8	100	7	100
5.	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	100	100	98,39	98,39	100	100
6.	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	1:462	94,9	1:415,8	93,25	1 ; 225	52,9
7.	Presentasi KB Aktif dan Mandiri	52	208	56%	160	56	124,44
8.	Presentasi Penduduk yang terlayani	116.367	84%	83,59	116,09	81,3	108,4

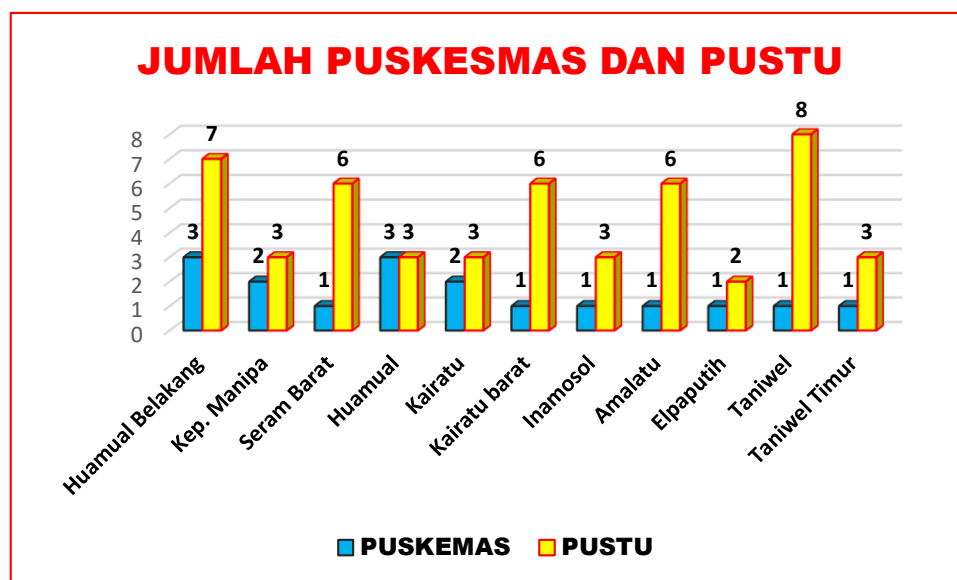
Tabel 3.34
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kualitas Hidup dan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	1:2932,5	1:2932,5	1 : 2.445	1 : 2006,9
2.	Angka Umur Harapan Hidup	60	65	85	70
3.	Jumlah Kematian Ibu melahirkan	5	4	6	2

4.	Angka Kematian Bayi	3	8	7	5
5.	Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	100	98,39	100	100
6.	Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	1:462	1:415,8	1 ; 225	1 : 385
7.	Presentasi KB Aktif dan Mandiri	52	56%	56	55
8.	Presentasi Penduduk yang terlayani KTP	116.367	83,59	81,3	80

Realisasi pada indikator **“Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 1 : 2.306,9 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 1 : 2.445 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 106% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

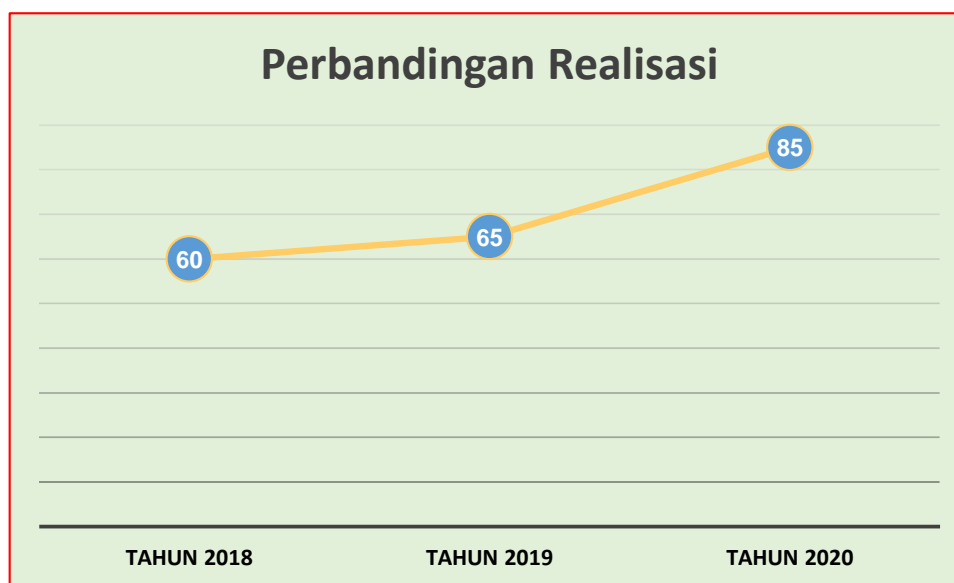
Grafik 3.7
Jumlah Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan
di Kabupaten Seram Bagian Barat



Realisasi pada indikator **“Angka Umur Harapan Hidup”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 65 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 85 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 130% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Realisasi pada indikator **“Jumlah Kematian Ibu melahirkan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 4 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 6 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 50% dengan kategori kriteria target kinerja adalah cukup. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus berupaya untuk tetap menekan angka kematian ibu hamil. Diharapkan pada target akhir yaitu pada tahun 2022 angka kematian ibu hamil ditekan sampai angka 2

Grafik 3.8
Perbandingan Realisasi Angka Umur Harapan Hidup
di Kabupaten Seram Bagian Barat 2018 - 2020

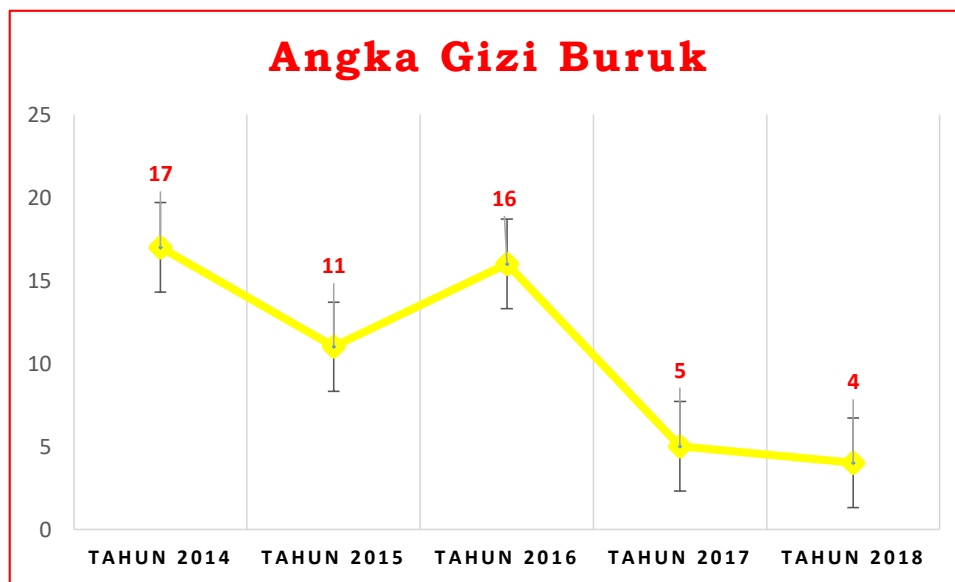


Realisasi pada indikator **“Jumlah Kematian Bayi”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 7 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 7 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 100%

dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat terus berupaya untuk tetap menekan angka kematian ibu hamil. Diharapkan pada target akhir yaitu pada tahun 2022 angka kematian ibu hamil ditekan sampai angka 5

Realisasi pada indikator **“Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 100% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 100% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 100% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat sangat serius dalam menangani masalah terkait gizi buruk dan terus berupaya untuk menekan angka gizi buruk hingga 0 (nol)

Grafik 3.9
Angka Gizi Buruk di Kabupaten Seram Bagian Barat dari 2014 - 2018



Realisasi pada indikator **“Rasio SDM Kesehatan per Penduduk”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 1 : 425 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 1:225 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 52,9% dengan kategori kriteria target kinerja adalah cukup.

Realisasi pada indikator **“Presentasi KB Aktif dan Mandiri”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 45 % dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 56% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 124,44% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Realisasi pada indikator **“Prsentasi Penduduk yang terlayani”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 75% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 81,3 % dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 108,4 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Sasaran strategis ini mencapai hasil yang sangat memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

1. Bertambahnya Puskesmas dan Pustu;
2. Penambahan Jumlah Tenaga Kesehatan baik tenaga perawat, kebidanan, dokter umum dan dokter ahli.

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp 95.568.557.601 Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 83.839.250.566 atau 88 % OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sasaran 11. Meningkatkan Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Menuju Kemandirian Rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Berdikari”** guna mencapai Misi **“Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”**.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar untuk untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan daya saing masyarakat menuju kemandirian melalui pengelolaan koperasi dan peningkatan industri kecil dan usaha mikro yang semakin baik di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **107,04 %**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35
Capaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentase koperasi aktif	%	118	122	103
2.	Pertumbuhan wirausaha baru	%	20	13	65
3.	Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha	%	100	100	100
4.	Jumlah sentra Industri	%	3	3	100
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	52	86,96	167,23
Rata – Rata (%)					107,04 %

Tabel 3.36
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat Tahun 2020 dengan Tahun 2017 - 2018

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase koperasi aktif	155	100	112	96,55	122	103
2.	Pertumbuhan wirausaha baru	1775	100	5	25	13	65
3.	Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha	18,51	24.1	20	20	100	100
4.	Jumlah sentra Industri	2	100	2	95	3	100
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	89,96	124,74	86,96	115,03	86,96	167,23

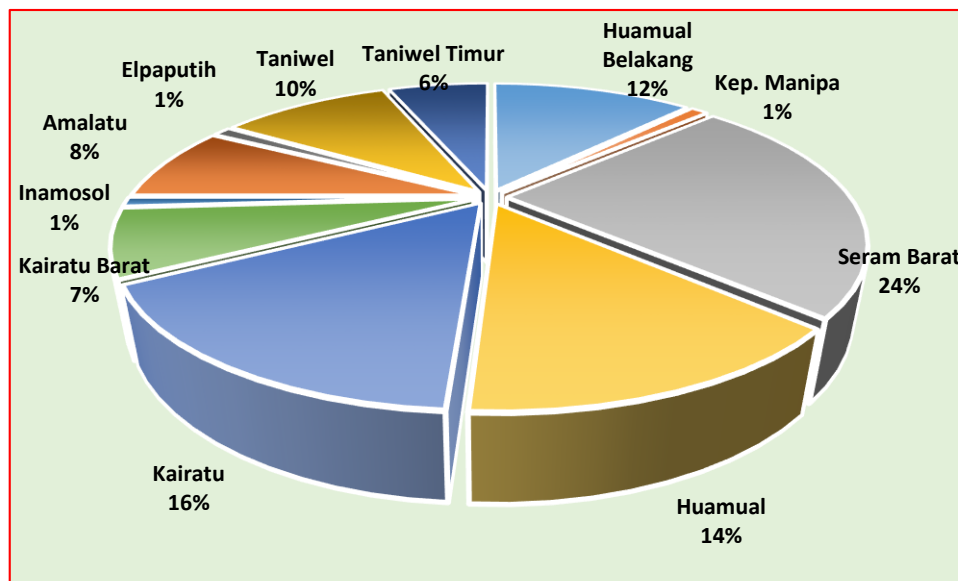
Tabel 3.37
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Koperasi, Industri Kecil dan Usaha Mikro Masyarakat Tahun 2019 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Presentase koperasi aktif	155	112	122	122
2.	Pertumbuhan wirausaha baru	1775	5	13	20

3.	Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha	18,51	20	100	100
4.	Jumlah sentra Industri	2	2	3	40
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	89,96	86,96	86,96	65

Realisasi pada indikator **“Presentase koperasi aktif”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 118 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 122, dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 103 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Grafik 3.10
Persentase Jumlah Koperasi Per Kecamatan
di Kabupaten Seram Bagian Barat

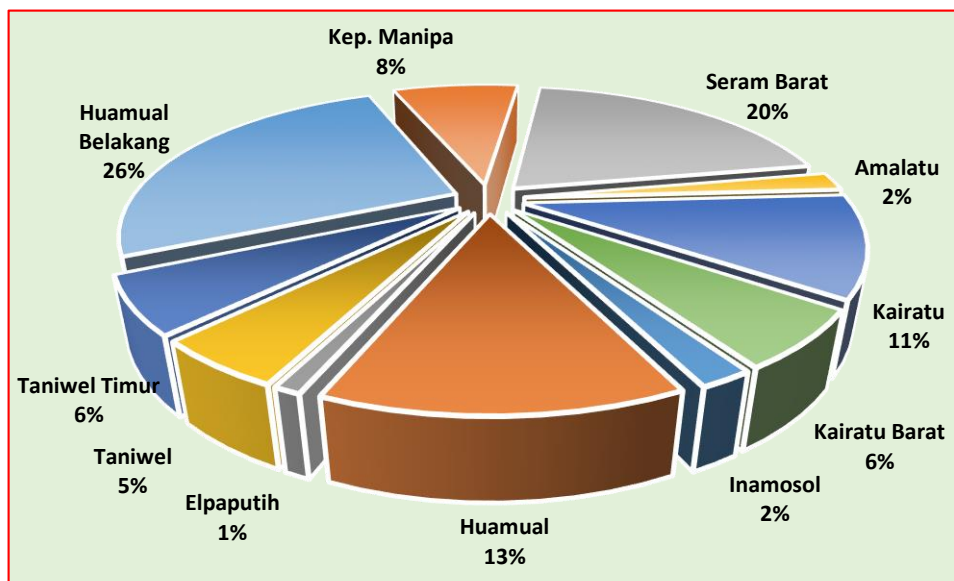


Realisasi pada indikator **“Pertumbuhan wirausaha baru”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 20 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 13, dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 65% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik.

Realisasi pada indikator **“Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 100 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 20, dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 100% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Realisasi pada indikator **“Jumlah sentra Industri”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 3 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 3, dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 100% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Grafik 3.11
Persentase Jumlah Unit Usaha Industri Per Kecamatan
di Kabupaten Seram Bagian Barat



Realisasi pada indikator **“Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 52 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 86,96, dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 167,3% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Sasaran strategis ini mencapai hasil yang sangat baik disebabkan oleh beberapa faktor antara lain

1. Pengelolaan kelembagaan koperasi yang semakin terjaga
2. Tingkat kopetitif ditingakt usaha kecil menengah yang sehat
3. Penyediaan sistim pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah dengan ketersediaan tempat dan lokasi pemasaran
4. Iklim usaha menengah yang semakin kondusif

Sasaran strategis ini juga memiliki beberapa indikator yang hanya mencapai target sangat kurang, hal ini disebabkan karena belumnya maksimalnya koperasi dalam hal pemanfaatan dana penguatan modal yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Pemerintah Provinsi dalam hal ini LPDB dan Pemerintah Pusat

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp 2.317.064.300,- dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 2.230.744.500,- atau 96,85%. OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sasaran 12. Meningkatkan Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “***Menuju Kemandirian Rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Berdikari***” guna mencapai Misi “***Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat***”.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar untuk Meningkatkan produksi nilai tambah pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **93,83 %**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.38
Capaian Sasaran Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Produksi hasil pertanian	(Ton/Tahun)	5,9	5.4	91,5
2.	Ketersediaan pangan utama	Kg/Kapita/Tahun	378,	554,1	147,7
3.	Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	78,22	63,02	80,6
4.	Nilai tukar nelayan (NTN)	NTN	16.682,8	-	-
5.	Produksi hasil perikanan (ton/tahun)	(Ton/Tahun)	26.176,67	32.515,57	124,2
6.	Produksi hasil perkebunan (ton/tahun)	(Ton/Tahun)	13.785,57	12.611	119
Rata - Rata (%)					93,83 %

Tabel 3.39
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Produksi hasil pertanian	2,93	83,71	2.93	51,4	5.4	91,5
2.	Ketersediaan pangan utama	293	83,71	292,6	78,8	554,1	147,7
3.	Konsumsi Ikan	46,03	60,64	62,74	81,41	63,02	80,6
4.	Nilai tukar nelayan (NTN)	14.120,2	92,79	15.142,3	99,85	-	-
5.	Produksi hasil perikanan (ton/tahun)	25,118	98,99	25,637	99,24	32.515,57	124,2
6.	Produksi hasil perkebunan (ton/tahun)	11,52	83,5	11,169	81,93	12.611	119

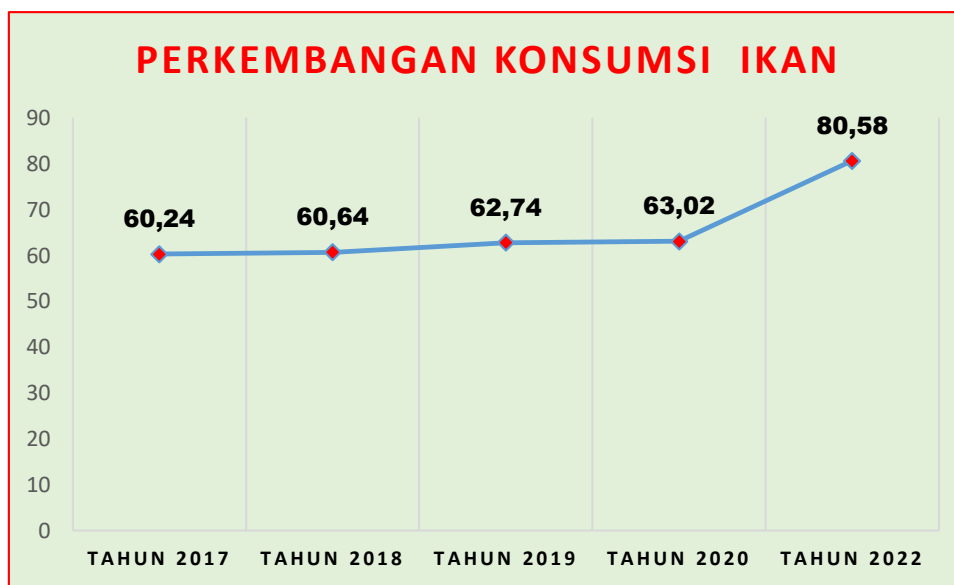
Tabel 3.40
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produksi Nilai Tambah Dan Pemasaran, Hasil Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Produksi hasil pertanian	2,93	2.93	5.4	6,4
2.	Ketersediaan pangan utama	2.93	292,6	554,1	3821,5
3.	Konsumsi Ikan	46,03	62,74	63,02	80,58
4.	Nilai tukar nelayan (NTN)	14.120,2	15.142,3	-	18.392

5.	Produksi hasil perikanan (ton/tahun)	25,118	25,637	32,515	27,778
6.	Produksi hasil perkebunan (ton/tahun)	11,52	11,169	12.611	14,052

Realisasi pada indikator **“Produksi hasil pertanian”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 5,9 ton dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 4,4 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 91,5% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Grafik 3.12
Realisasi Presentase Konsumsi Ikan di Kabupaten Seram Bagian Barat
2017 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD



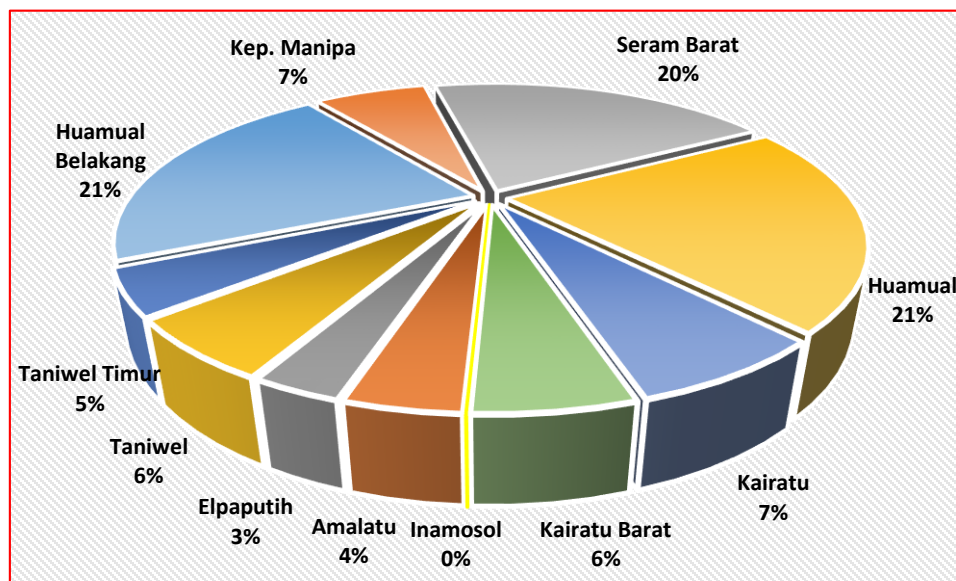
Realisasi pada indikator **“Ketersediaan pangan utama”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 378,65 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 554,1 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 147,7% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Realisasi pada indikator **“Konsumsi Ikan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 78,22 Kg/Kapita/Tahun dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 63,02 Kg/Kapita/Tahun dengan capaian kinerja pada indicator

ini adalah sebesar 80,60% dengan kategori kriteria target kinerja adalah memuaskan.

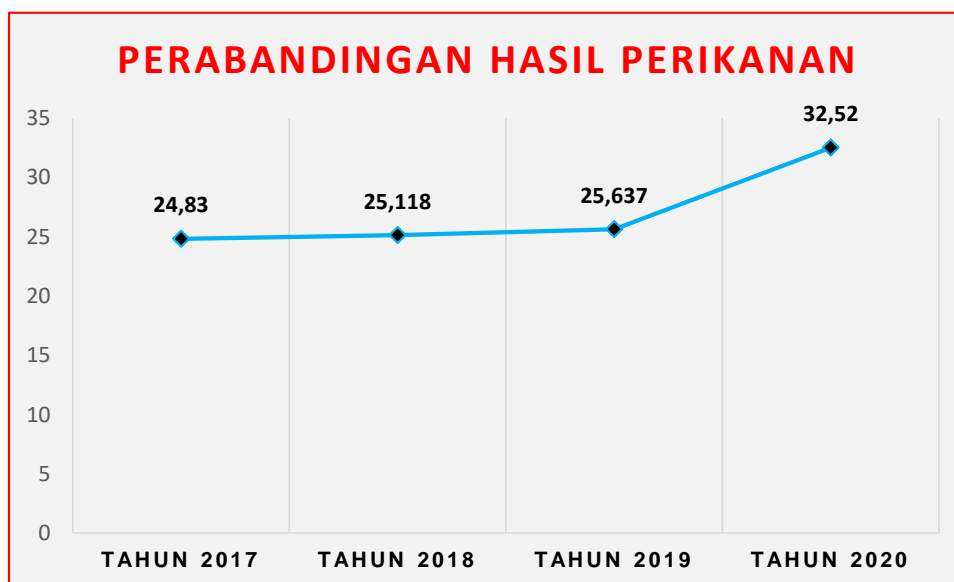
Realisasi pada indikator **“Nilai tukar nelayan (NTN)”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 32.515,57, namun realisasinya di Kabupaten Seram Bagian Barat tidak digambarkan secara signifikan, hal ini dikarenakan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2020 Digambarkan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik, terkait dengan Nilai Tukar Nelayan Tahun 2018 sebesar 113,28 naik sebesar 113,74 pada tahun 2019. Dengan demikian dapat menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan nelayan semakin baik. Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan merupakan dampak peningkatan volume dan nilai produksi perikanan yang diperoleh masyarakat. Capaian Nilai Tukar Nelayan propinsi Maluku tahun 2019 107,69 kemudian mengalami penurunan pada bulan april tahun 2020 sebesar 101,69 (Laporan Tahunan Kementerian Perikanan dan Kelautan Tahun 2019 dan BPS Propinsi Maluku dalam Angka Tahun 2020).

Grafik 3.13
Jumlah Nelayan Per Kecamatan
di Kabupaten Seram Bagian Barat



Realisasi pada indikator **“Produksi hasil perikanan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 26.176,67 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 32.515,57 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 124,2% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Grafik 3.14
Realisasi Presentase Prodiksi Hasil Perikanan
di Kabupaten Seram Bagian Barat
Tahun 2017 - 2020



Realisasi pada indikator **“Produksi hasil perkebunan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 13.785,57 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 12.611 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 119 % dengan kategori kriteria kinerja adalah sangat memuaskan.

Sasaran strategis ini mencapai hasil yang memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

1. Kemampuan Petani dalam Memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan Keluarga;

2. Kemampuan Petani dalam Memenuhi kebutuhan produksi dan kebutuhan keluarga;
3. Terselenggaranya Program peningkatan, program penyediaan, program pengembangan, program optimalisasi dan program pemberdayaan di bidang pertanian, perikanan, perkebunan dan ketahanan pangan.

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ini yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp 18.487.155.945. Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 18.229.437.279 atau 98,60%. OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Seram Bagian Barat.

Sasaran 13. Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan “***Menuju Kemandirian Rakyat Kabupaten Seram Bagian Barat Yang Berdikari***” guna mencapai Misi “***Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat***”.

Sasaran Strategis ini dimaksudkan agar untuk menekan tingkat kemiskinan pada masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat “**Memuaskan**” dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **89,6 %**. Hasil pengukuran Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.41
Capaian Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentase Penurunan Angka Miskin	%	2,46	2,40	97,7
2.	Jumlah PMKS Penerima Bantuan	Org/Tahun	530	432	81,5
Rata - Rata (%)					89,6 %

Tabel 3.42
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentase Penurunan Angka Miskin	0,20	8,23%	0,72	29,27%	2,40	97,7
2.	Jumlah PMKS Penerima Bantuan	79	15,04	1.656	312,45	432	81,5

Tabel 3.43
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Menurunnya Angka Kemiskinan Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Presentase Penurunan Angka Miskin	0,20	0,72	2,40	2,50
2.	Jumlah PMKS Penerima Bantuan	79	1.656	432	540

Realisasi pada indikator **“Presentase Penurunan Angka Miskin”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 2,46% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 2,40% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 97,7% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan.

Realisasi pada indikator **“Jumlah PMKS Penerima Bantuan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 530 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 432 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 81,5% dengan kategori kriteria target kinerja adalah memuaskan.

Grafik 3.15
Realisasi Presentase Penurunan Angka Kemiskinan
di Kabupaten Seram Bagian Barat 2020
dengan Target Akhir RPJMD



Sasaran strategis ini mencapai hasil yang memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain realisasi pelaksanaan program mencakupi target / hasil yang diraih apabila dalam pelaksanaan kegiatan proses perancangan program dan kegiatan masing-masing bidang dapat terlaksana secara optimal yakni pelaksanaan kinerja sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Adapun beberapa Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam menunjang sasaran ini antara lain :

1. Bantuan Pemberdayaan Usaha KUBE;
2. Pemantauan Penyaluran RASTRA;
3. Sosialisasi Perubahan RASTRA ke BPNT;
4. Verikasi dan Validasi Data Miskin (BDT dan Non BDT);
5. Penyediaan Bufer Stock Kesiapsiagaan Bencana;
6. Rehabiltasi Rumah Tidak Layak Huni.

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan yang dikerahkan untuk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis Menurunkan Angka Kemiskinan adalah sebesar Rp. 1.120.781.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.035.930.050,-. OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung sasaran ini adalah Dinas Sosial dengan jumlah SDM 30 PNS.

Sasaran 14. Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Terciptanya Sistem Transportasi Laut, Darat Dan Udara Yang Terintegrasi”** guna mencapai Misi **“Mempercepat Pembangunan Infastruktur”**.

Sasaran strategis dimaksud untuk meningkatkan pembangunan jaringan transportasi untuk menghubungkan wilayah pedesaan dengan kecamatan dan ibu kota Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Baik”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **77,77 %**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.44
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentasi Panjang Jalan Kondisi Baik	%	68,46	51,96	75,90
2.	Presentasi Panjang Jembatan Kondisi Baik	%	42,33	-	0
3.	Cakupan Pelayanan Air Minum	%	88	70,42	80,02
4.	Presentase Penataan Kawasan Permukiman	%	62,40	106	169,87
5.	Presentasi Fasilitas Dan Infastruktur Pehubungan Yang Baik	%	21,68	20,05	92,5
6.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum		10.895.926	123.463	1,13
7.	Presentasi Layanan Informasi Teknologi (IT)	%	40	50	125,00
Rata - Rata (%)					77,77 %

Tabel 3.45
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentasi Panjang Jalan Kondisi Baik	45	90	24,60	45,81	51,96	75,90

2.	Presentasi Panjang Jembatan Kondisi Baik	15	50	25	62,03	-	0
3.	Cakupan Pelayanan Air Minum	55,47	73,96	60,47	75,5	70,42	80,02
4.	Presentase Penataan Kawasan Permukiman	-	-	-	-	106	169,87
5.	Presentasi Fasilitas Dan Infrastruktur Pehubungan Yang Baik	13,81	47,65	16,56	94,19	20,05	92,5
6.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	1.169.790	58,12	1.329.840	13,67	123.463	1,13
7.	Presentasi Layanan Informasi Teknologi (IT)	5	22,72	26,76	89,2	50	125,00

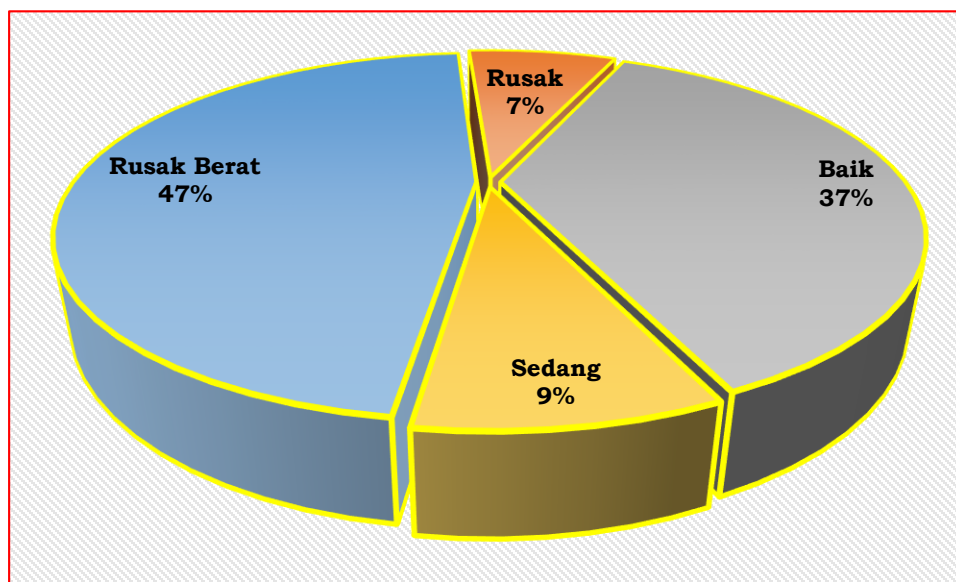
Tabel 3.46
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Kinerja Meningkatnya
Kualitas Dan Kuantitas Infastruktur Tahun 2020 dengan
Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Presentasi Panjang Jalan Kondisi Baik	45	24,60	51,96	78,20
2.	Presentasi Panjang Jembatan Kondisi Baik	15	25	-	46,67
3.	Cakupan Pelayanan Air Minum	55,47	60,47	70,42	100
4.	Presentase Penataan Kawasan Permukiman	-	-	106	100

5.	Presentasi Fasilitas Dan Infrastruktur Pehubungan Yang Baik	13,81	16,56	20,05	19,04
6.	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum	1.169.790	1.329.840	123.463	14.785.770
7.	Presentasi Layanan Informasi Teknologi (IT)	5	26,76	50	65

Realisasi pada indikator **“Presentasi Panjang Jalan Kondisi Baik”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 68,46% dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 51,96% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 75,90% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat baik.

Grafik 3.15
Presentase Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Seram Bagian Barat



Realisasi pada indikator **“Presentasi Panjang Jembatan Kondisi Baik”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 42,33% dan realisasi kinerja di tahun 2020 tidak ada, hal ini disebabkan karena tidak adanya data yang signifikan dari OPD terkait.

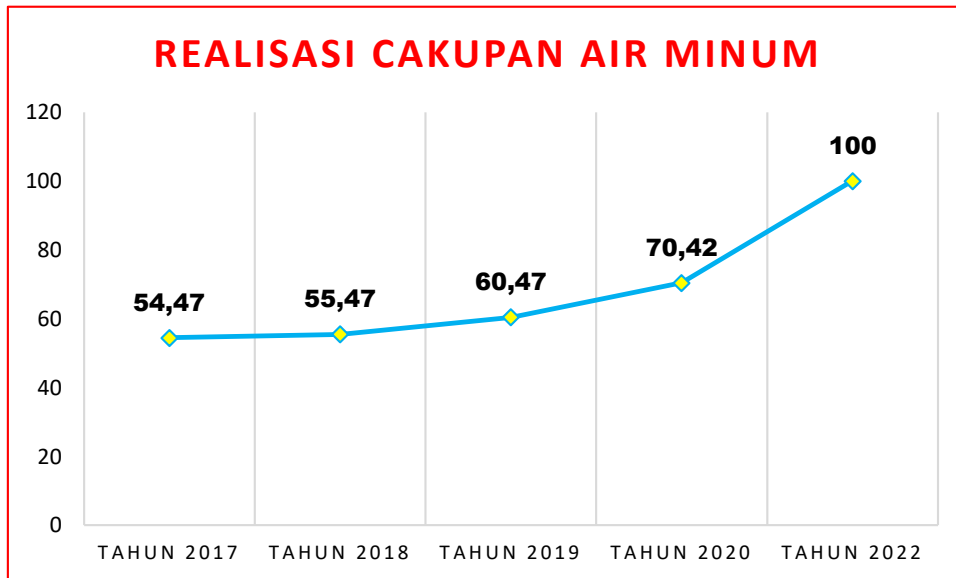
Realisasi pada indikator **“Cakupan Pelayanan Air Minum”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 88 % dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 70,42 % dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 80,02% dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik.

Realisasi pada indikator **“Persentase Penataan Kawasan Permukiman”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 62,40 % dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 106 % dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 169,87 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah Sangat Memuaskan.

Realisasi pada indikator **“Presentasi Fasilitas Dan Infrastruktur Pehubungan Yang Baik”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 21,68 % dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 20,05 % dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 92,5 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu, memprioritaskan alokasi dana dan efisiensi melalui peningkatan SDM serta peningkatan sarana, prasarana perhubungan serta penyelesaian sedini mungkin terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.

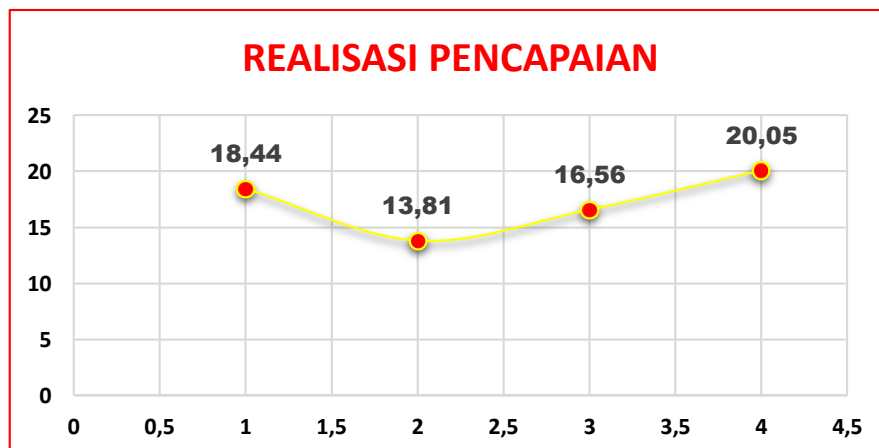
Realisasi pada indikator **“Presentasi Layanan Informasi Teknologi (IT)”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 40 % dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 50 % dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 125% dengan kategori kriteria target kinerja adalah memuaskan. Indikator ini dapat mencapai hasil yang memuaskan disebabkan pemanfaatan aplikasi e-government, jumlah aplikasi e-gov yang berbasis jaringan informatika yang digunakan oleh OPD dan jumlah BTS yang dipasang dapat berjalan dengan baik. Tersedianya informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang dipublikasikan pada web resmi <http://sbbkab.go.id>

Grafik 3.16
Realisasi Presentase Cakupan Pelayanan Air Minum di Kabupaten Seram Bagian Barat 2017- 2020 dengan Target Akhir RPJMD



Realisasi pada indikator **“Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 10.895.926 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 123.463 % dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 1,13 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat kurang.

Grafik 3.17
Realisasi Presentase Fasilitas dan Infrastruktur Perhubungan Yang Baik di Kabupaten Seram Bagian Barat 2017 - 2020



Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan yang dikerahkan untuk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur adalah sebesar Rp. 83.425.667.539,- dengan realisasi sebesar Rp. 69.627.024.678,-. OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung sasaran ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan serta Dinas Komunikasi dan Informasi.

Capaian Sasaran Strategis tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan didukung oleh berbagai pihak (*stakeholder*).

Sasaran 15. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan ***“Terciptanya Sistem Transportasi Laut, Darat Dan Udara Yang Terintegrasi”*** guna mencapai Misi ***“Mempercepat Pembangunan Infrastruktur”***.

Sasaran strategis ditujukan sebagai upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui perbaikan sistem dan pengelolaan sanitasi serta lingkungan hidup secara partisipatif dengan memberi peran yang sebesar besarnya kepada masyarakat melalui proses pembelajaran dan pemberdayaan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“kurang”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **46 %**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.47
Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Resiko Bencana	%	127	20	15,74
2.	Jumlah Timbunan Sampah Per Hari	Ton	35,42	31,64	89,32
3.	Jumlah Sampah yang Di Tangani	Ton	19,48	7	35,93
Rata - Rata (%)					46 %

Tabel 3.48
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

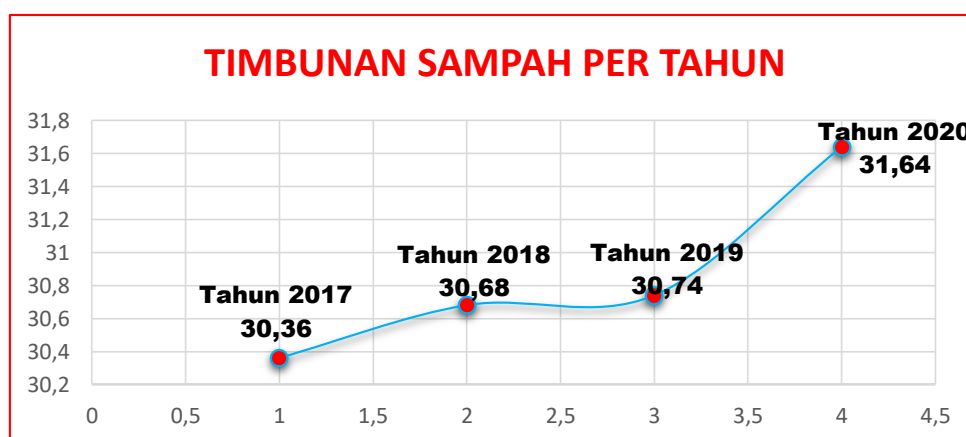
No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Indeks Resiko Bencana	20%	12,12%	20	13,79%	20	15,74
2.	Jumlah Timbunan Sampah Per Hari	30,68 Ton/Thn	91,25%	30,74 Ton/Thn	89,20%	31,64 Ton/Thn	89,32
3.	Jumlah Sampah yang Di Tangani	7,26 Ton/Thn	44,98%	7,26 Ton/Thn	41,25%	7 Ton/Thn	35,93

Tabel 3.49
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan
Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Indeks Resiko Bencana	20	20	20	115
2.	Jumlah Timbunan Sampah Per Hari	30,68 Ton/Thn	30,74 Ton/Thn	31,64 Ton/Thn	37,21 Ton
3.	Jumlah Sampah yang Di Tangani	7,26 Ton/Thn	7,26 Ton/Thn	7 Ton/Thn	24,18

Realisasi pada indikator **“Indeks Resiko Bencana”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 127 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 20 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 15,74% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat kurang. Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yaitu Tersedianya Dokumen Penanggulangan Bencana (Buku Data Bencana), dan Terlaksananya Penanggulangan Bencana pada saat Pra Bencana, Saat Bencana, dan Pasca Bencana secara cepat, tepat dan terpadu.

Grafik 3.18
Jumlah Timbunan Sampah Per Tahun Di Kabupaten Seram Bagian Barat



Realisasi pada indikator **“Jumlah Timbunan Sampah Perhari”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 35,42 Ton/Thn dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 31,64 Ton/Thn dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 89,32 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah memuaskan.

Realisasi pada indikator **“Jumlah Sampah yang Di Tangani”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 19,87 Ton/Thn dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 7,00 Ton/Thn dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 35,93 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah kurang.

Penanganan sampah belum mencapai target yang ditetapkan karena minimnya armada sampah dan belum adanya buruh pengangkut sampah. Pemerintah Daerah tetap memprioritaskan masalah sampah kedepan. Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan yang dikerahkan untuk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp. 2.367.506.300,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.340.423.750,-. atau 99. OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung sasaran ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan SDM berjumlah 21 orang dan Dinas Lingkungan Hidup dengan jumlah SDM 32 orang.

Sasaran 16. Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisatawan

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Meningkatnya Kontribusi Pariwisata Terhadap Perekonomian”** guna mencapai Misi **“Pembangunan Pembangunan Pariwisata”**.

Sasaran strategis ditujukan untuk membuka keterisoliran wilayah dengan cara membuka akses infrastruktur yang berkualitas sehingga dapat

menjadi penunjang potensi pariwisata yang ada di kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisatawan, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Kurang”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **30,94 %**. Hasil pengukuran Sasaran Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisatawan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.50
Capaian Sasaran Terbukanya Isolasi Daerah Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisatawan Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Jumlah objek pariwisata andalan	%	8	3	37,5
2.	Jumlah kunjungan wisatawan	Jiwa	24.100	8.909	36,9
3.	Lama tinggal wisatawan Nusantara	Hari	3	2	66
4.	Lama tinggal wisatawan Mancanegara	Hari	3,25	-	-
5.	Kegiatan budaya dan pesta adat	Kegiatan	7	1	14,3
6.	Jumlah Benda dan Situs Sejarah yang Dilestarikan	Unit	21	0	0
Rata - Rata (%)					30,94 %

Tabel 3.51
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Terbukanya Isolasi Daerah
Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisatawan Tahun 2020
dengan Tahun 2018 – 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Jumlah objek pariwisata andalan	-	-	7	100	3	37,5
2.	Jumlah kunjungan wisatawan	9.787	43,01	10.050	42,76	8.909	36,9
3.	Lama tinggal wisatawan Nusantara	2,63	105,2	8,26	275,33	2	66
4.	Lama tinggal wisatawan Mancanegara	2,63	115,56	12,2	488	-	-
5.	Kegiatan budaya dan pesta adat	0	0	1	14,28	1	14,3
6.	Jumlah Benda dan Situs Sejarah yang Dilestarikan	15	107,14	15	107,14	0	0

Tabel 3.52
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Terbukanya Isolasi Daerah
Sekaligus Menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisatawan Tahun 2020
dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Jumlah objek pariwisata andalan	-	7	3	10

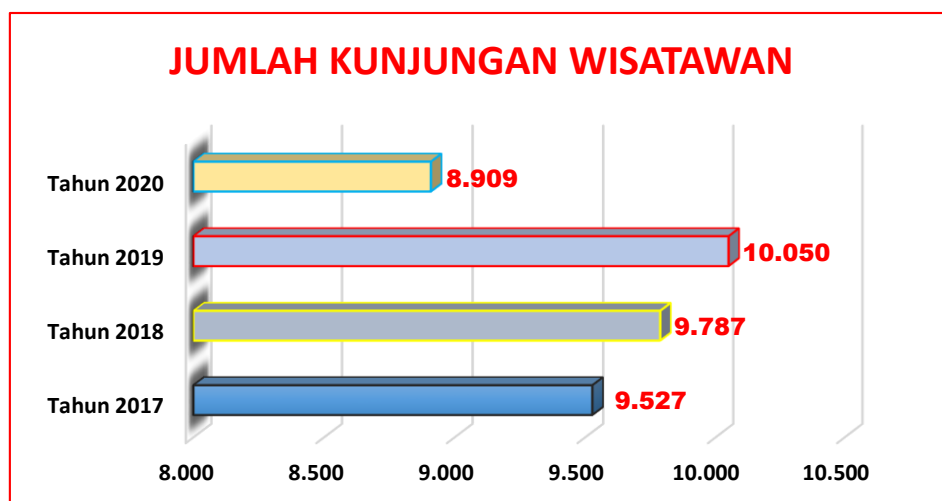
2.	Jumlah kunjungan wisatawan	9.787	10.050	8.909	25.000
3.	Lama tinggal wisatawan Nusantara	2,63	8,26	2	3,5
4.	Lama tinggal wisatawan Mancanegara	2,63	12,2	-	3,75
5.	Kegiatan budaya dan pesta adat	0	1	1	7
6.	Jumlah Benda dan Situs Sejarah yang Dilestarikan	15	15	0	25

Realisasi pada indikator **“Jumlah Objek Pariwisata Andalan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 8 dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 3 dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 37,5 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah kurang.

Realisasi pada indikator **“Jumlah Kunjungan Wisatawan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 24.100 wisatawan dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 8.909 wisatawan dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 36,9 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah kurang.

Grafik 3.19

Jumlah Kunjungan Wisatawan Di Kabupaten Seram Bagian Barat 2017 - 2020 dengan Target Akhir RPJMD



Realisasi pada indikator **“Lama Tinggal Wisatawan Nusantara”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 3 hari dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 2 hari dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 66 % dengan kategori kriteria target kinerja adalah baik.

Realisasi pada indikator **“Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 3 hari, namun pada tahun 2020 adanya wabah covid 19, mengakibatkan tidak adanya kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Seram Bagian Barat.

Realisasi pada indikator **“Kegiatan Budaya Dan Pesta Adat”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 7 kegiatan dan realisasi realisasi kinerja di tahun 2020 adalah 1 kegiatan sehingga capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 14,28% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat rendah. Factor utama tidak tercapainya target kegiatan Budaya dan Pesta Adat adalah minimnya anggaran dan yang tersealisasi hanya 1 kegiatan yaitu Festival Antar Dulan di Dusun Talaga Desa Piru Ke. Seram Barat yang dilaksanakan 7 hari setelah Idhul Fitri.

Realisasi pada indikator **“Jumlah Benda dan Situs Sejarah yang Dilestarikan”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 21 benda dan situs sejarah yang dilestarikan baik itu oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, namun pada tahun 2020 tidak adanya benda atau situs sejarah yang ditambahkan.

Sasaran strategis ini tidak mencapai hasil yang memuaskan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain ;

1. Pengelolaan Pariwisata masih dilakukan secara tradisional;
2. Sarana dan prasarana pariwisata kurang memadai dan belum tertata dengan baik;
3. Minimnya pengembangan objek wisata baru;
4. Penyebarluasan informasi objek dan daya tarik wisata serta sarana pendukungnya kepada masyarakat belum optimal;
5. Adanya wabah covid 19, mengakibatkan beberapa tempat wisata di tutup.

Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan Program/Kegiatan yang dikerahkan untuk Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis Terbukanya Isolasi Daerah sekaligus menunjang Pembangunan Potensi Kepariwisata adalah sebesar Rp. 4.447.152.690,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.224.066.587,-. Atau sebesar 94,98 % OPD dengan SDM yang bertanggung jawab dalam mendukung sasaran ini adalah Dinas Pariwisata dan Dinas Pendidikan.

Sasaran 17. Meningkatkan Iklim Investasi daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengandalkan Potensi Ekonomi Daerah”** guna mencapai Misi **“Memberikan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat”**.

Sasaran strategis ditujukan untuk menciptakan sistem pelayanan perijinan yang baik berupa kemudahan dalam memberikan perijinan bagi pelaku usaha, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung ekonomi masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatkan Iklim Investasi daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **103,5 %**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Iklim Investasi daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.53
Capaian Sasaran Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Potensi Kepariwisata Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Pertumbuhan PDRB		6,87	5,56	80
2.	Persentasi Pertumbuhan Investasi	%	20	24	120
3.	Waktu penyelesaian izin	Hari	2	2	100
4.	Angka partisipasi angkatan kerja		72,54	19,6	27,01
5.	Tingkat pengangguran terbuka		10,50	20	190,5
Rata - Rata (%)					103,5 %

Tabel 3.54
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Potensi Kepariwisata Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Pertumbuhan PDRB	-	-	5,56	75,44	5,56	80
2.	Persentasi Pertumbuhan Investasi	-	-	0	0	24	120
3.	Waktu penyelesaian izin	3	100	3	100	2	100

4.	Angka partisipasi angkatan kerja	20	100	19,6	99,80	19,6	27,01
5.	Tingkat pengangguran terbuka	20	100	20	100	20	190,5

Tabel 3.55

Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perizinan dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah Potensi Kepariwisata Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 – 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Pertumbuhan PDRB	-	5,56	5,56	6,04
2.	Persentasi Pertumbuhan Investasi	-	0	24	20
3.	Waktu penyelesaian izin	3	3	2	1
4.	Angka partisipasi angkatan kerja	20	19,6	19,6	62,50
5.	Tingkat pengangguran terbuka	20	20	20	6

Sasaran 18. Meningkatkan Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal

Sasaran Strategis ini merupakan penjabaran terhadap Tujuan **“Menciptakan Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengandalkan Potensi Ekonomi Daerah”** guna mencapai Misi **“Memberikan Kemudahan Berinvestasi di Kabupaten Seram Bagian Barat”**.

Sasaran strategis ditujukan untuk meningkatkan kemampuan perekonomian kabupaten Seram Bagian Barat dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dan memperkuat daya tahan perekonomian lokal demi kesejahteraan masyarakat kabupaten Seram Bagian Barat.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal, dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran ini tergolong kategori predikat **“Sangat Memuaskan”** dengan rata-rata capaian kinerja sasaran **126,53 %**. Hasil pengukuran Sasaran Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.56
Capaian Sasaran Meningkatnya Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal Tahun 2020

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Presentasi Produk Masyarakat Yang Masuk Pasaran	%	15	18,98	126,53
Rata - Rata (%)					126,53 %

Tabel 3.57
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal Tahun 2020 dengan Tahun 2018 - 2019

No	INDIKATOR KINERJA	2018		2019		2020	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1.	Presentasi Produk Masyarakat Yang Masuk Pasaran	19,63	98,17	18,98	189,8	18,98	126,53

Tabel 3.58
Perbandingan Realisasi & Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal Tahun 2020 dengan Target RPJMD Periode 2017 - 2022

No	INDIKATOR KINERJA	REALISASI			TARGET
		2018	2019	2020	2022
1.	Presentasi Produk Masyarakat Yang Masuk Pasaran	19,63	18,98	18,98	20

Realisasi pada indikator **“Presentasi Produk Masyarakat Yang Masuk Pasaran”** dimana Target pada indicator kinerja ini adalah 15 % dan realisasi kinerja di tahun 2020 adalah sebesar 18,98% dengan capaian kinerja pada indicator ini adalah sebesar 126,53% dengan kategori kriteria target kinerja adalah sangat memuaskan. Sasaran strategis ini mencapai hasil yang sangat memuaskan disebabkan oleh semangat dan tekad dari Pimpinan dan seluruh Staf Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja.

Grafik 3.20
Perbandingan Realisasi Produk Masyarakat Yang Masuk Pasaran di Kabupaten Seram Bagian Barat 2017 - 2019 dengan Target Akhir RPJMD



Sumber daya anggaran untuk pelaksanaan sasaran ***Meningkatnya Iklim Investasi Daerah Dengan Meningkatkan Inovasi Pelayanan Perijinan Dan Peningkatan Infrastruktur Ekonomi Daerah*** dan sasaran ***Meningkatnya Daya Saing Dan Menjaga Stabilitas Ekonomi Lokal*** yang dikerahkan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang Sasaran Strategis ini adalah sebesar Rp 11.043.498.906,- Dari total anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 8.889.939.756 atau 80,50 %. OPD yang bertanggung jawab dalam mendukung tercapainya sasaran ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Keseluruhan jабaran APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya diimplementasikan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020. Gambaran anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 yang dikelola oleh Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.59
Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat per OPD tahun 2020

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	120.162.482.719,36,-	66.885.378.303,-	55,66
2	Dinas Kesehatan	90.579.584.863,-	77.492.182.964,-	85,55

3	Rumah Sakit Umum Daerah	17.950.253.463,-	17.876.406.079,-	99,59
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	73.998.753.229,-	61.649.398.409,-	83,31
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	9.587.353.700,-	9.314.532.530,-	97,15
6	Badan KesbangPol dan Linmas	1.797.633.900,-	1.728.235.600,-	96,14
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	4.653.828.000,-	4.609.367.829,-	99,04
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.891.440.850,-	1.863.932.50,-	98,55
9	Dinas Sosial	1.710.000.000,-	1.618.510.550,-	94,65
10	Dinas Ketahanan Pangan	892.679.800,-	883.720.000,-	99,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	1.949.250.910,-	1.902.298.195,-	97,59
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.063.515.950,-	1.823.998.551,-	88,39
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.601.532.605,-	2.552.775.084,-	98,13
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.537.041.600,-	5.063.404.205,-	91,45
15	Dinas Perhubungan	10.919.743.920,-	7.796.337.822,-	71,40
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.665.498.020,-	1.646.371.225,-	98,85
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.089.235.320,-	1.995.228.000,-	95,50
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.033.568.410,-	797.629.130,-	77,17
19	Dinas Pemuda dan Olah Raga	1.509.590.750,-	1.454.484.848,-	96,35
20	Dinas Kearsipan	581.943.160,-	570.338.160,-	98,01
21	Dinas Perikanan	7.924.948.045,-	7.791.029.124,-	98,31
22	Dinas Pariwisata	5.089.636.852,-	4.866.023.387,-	95,6

23	Dinas Pertanian	11.756.862.500,-	11.574.154.235,-	98,45
24	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	11.909.781.406,-	9.733.777.090,-	81,73
25	Sekretariat Daerah	13.506.302.820,-	12.429.463.033,-	92,03
26	Bagian Hukum	1.367.755.120,-	1.362.958.030,-	99,65
27	Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah	4.804.744.300,-	2.281.683.240,-	47,49
28	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	1.026.408.500,-	1.003.517.400,-	97,77
29	Bagian Kesejahteraan Rakyat	2.529.757.185,-	2.450.100.200,-	96,85
30	Bagian Umum	8.207.409.322,-	7.991.669.448,-	97,37
31	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokoler	1.676.107.650,-	1.671.799.000,-	99,74
32	Bagian Organisasi	718.768.800,-	637.993.700,-	88,76
33	Bagian Administrasi Pembangunan	650.238.200,-	623.453.800,-	95,88
34	Bagian Layanan Pengadaan	1.138.013.400,-	1.122.021.446,-	98,59
35	Sekretariat DPRD	28.974.662.037,-	28.363.912.797,-	97,89
36	Kecamatan Kairatu	374.325.305,-	371.582.015,-	99,27
37	Kecamatan Amalatu	374.874.850,-	374.193.500,-	99,82
38	Kecamatan Kairatu Barat	374.926.800,-	374.848.443,-	99,98
39	Kecamatan Inamosol	524.999.938,-	523.545.017,-	99,72
40	Kecamatan Seram Barat	399.994.876,-	396.404.965,-	99,10
41	Kecamatan Huamual	595.429.500,-	589.848.500,-	99,06
42	Kecamatan Huamual Belakang	582.400.700,-	570.817.167,-	98,01
43	Kecamatan Kepulauan Manipa	587.000.000,-	579.492.950,-	98,72
44	Kecamatan Taniwel	374.996.600,-	369.290.354,-	98,48

45	Kecamatan Taniwel Timur	374.999.300,-	344.741.910,-	91,93
46	Kecamatan Elpaputih	399.969.500,-	398.364.500,-	99,60
47	Inspektorat	5.360.024.850,-	5.037.939.152,-	93,99
48	Badan Perencanaan	5.764.710.750,-	5.539.471.819,-	96,09
49	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD)	8.508.369.861,-	8.243.476.340,-	96,89
50	Badan Pendapatan	4.802.712.444,-	4.637.821.111,-	96,57
51	Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya	1.734.827.125,-	1.629.138.705,-	93,91
52	Badan Penelitian dan Pengembangan	2.171.533.850,-	2.119.507.120,-	97,60
JUMLAH TOTAL		486.341.724.645	395.528.569.482,-	82,55

Tabel 3.60
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Penunjang Sasaran Strategis Pemerintah Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 (status s/d Desember 2020)

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
SASARAN 1				
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	76.061.553.523	73.126.497.335	96,14
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	21.991.258.448	19.101.993.025	86,86
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	449.340.720	302.450.500	61,31
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.038.027.900,00	998.787.300,00	96,21
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.924.244.884	1.803.401.120,00	93,64
6.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.402.785.000	14.221.387.549	98,74
7.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	3.980.857.830	3.897.305.880	97,90
8.	Program peningkatan pelayanan barang/jasa	154.000.000	144.042.600	93,53
9.	Program pengembangan komunikasi dan informasi media massa	396.175.000	392.973.056	99,19

10.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	55.809.400	55.809.400	100,100
11.	Program penataan peraturan perundang-undangan daerah	327.622.800	326.948.000	99,79
12.	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat	110.207.000	109.932.000	99,75
13.	Program pengembangan data/informasi	465.771.600	450.909.319	96,81
14.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	161.017.800	160.997.715	99,99
15.	Program perencanaan pembangunan daerah	2.298.462.650	2.188.509.627	95,22
16.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	113.986.000	100.191.000	87,90
17.	Program perencanaan sosial budaya	289.553.600	286.778.600	99,04
18.	Program pengembangan wilayah dan SDA	94.833.600	92.653.000	97,70
19.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.305.053.245	6.058.884.760	96,00
20.	Program penelitian dan pengembangan	603.212.550	585.234.050	97,02
21.	Program pengembangan data/informasi	63.096.500	62.631.500	99,26
22.	Program Inovasi Daerah	359.085.900	353.852.400	98,54
23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	342.800.000	342.100.000	99,80
24.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	83.577.000	83.439.000	99,83

25.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	110.000.000	109.285.000	99,35
JUMLAH		132.182.332.950	125.356.993.736	94,83
SASARAN 2				
26.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.015.171.100	947.811.768	93,00
27.	Program penataan kelembagaan perangkat daerah	171.126.300	136.805.900	79,94
JUMLAH		1.186.297.400	1.084.617.668	91,43
SASARAN 3				
28.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	4.024.855.700	1.594.640.720	40,00
29.	Program penataan daerah otonomi baru	254.318.500	244.025.800	95,95
30.	Program peningkatan pelayanan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	799.253.000	789.606.600	98,79
31.	Program peningkatan pelayanan bidang pembangunan kawasan perdesaan	169.121.000	164.572.900	97,31
32.	Program peningkatan pelayanan bidang pemerintahan desa	331.150.500	318.705.500	96,24
33.	Program pengendalian pembangunan daerah	1.507.472.895	1.494.211.145	99,00
34.	Program penataan kelembagaan desa	10.000.000	10.000.000	100,00
JUMLAH		7.096.171.595	4.615.762.665	65,00

SASARAN 4 dan SASARAN 5				
35.	Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan	1.754.628.800	1.699.675.000	96,87
36.	Program pendidikan dan kesehatan	164.614.000	159.619.000	96,97
JUMLAH		1.919.242.800	1.859.294.000	97,00
SASARAN 6				
37.	Program keluarga berencana	4.991.019.400	4.552.162.100	91,21
38.	Program kesehatan reproduksi remaja	49.025.000	48.425.000	98,78
39.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	28.661.800	28.436.800	99,21
JUMLAH		5.068.706.200	4.629.023.900	91,00
SASARAN 7 dan SASARAN 8				
40.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	127.500.000	127.345.000	99,88
41.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	1.184.869.400	1.122.265.000	94,72
42.	Program pendidikan politik masyarakat	18.285.000	16.050.000	87,78
JUMLAH		1.330.654.400	1.265.660.000	95,00
SASARAN 9				
43.	Program pendidikan anak usia dini	4.254.026.700	4.166.250.600	97,94

44.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	111.498.598.169	59.369.611.003	53,25
45.	Program pendidikan non formal	524.687.500	113.650.000	21,66
46.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1.680.120.500	1.564.020.000	93,09
47.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	517.120.350	499.270.050	96,55
48.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	43.306.250	43.306.250	100,00
49.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	263.075.000	260.254.000	98,93
JUMLAH		118.780.934.469	66.016.361.903	56,00
SASARAN 10				
50.	Program obat dan perbekalan kesehatan	1.852.733.700	1.796.097.627	97,15
51.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	24.746.648	24.105.000	97,41
52.	Program perbaikan gizi masyarakat	50.000.000	50.000.000	100,00
53.	Program pengembangan lingkungan sehat	35.000.000	35.000.000	100,00
54.	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	1.206.044.000	1.165.271.400	96,62
55.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	36.375.162.915	30.834.828.511	84,77

56.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	49.025.000	48.825.000	99,59
57.	Program pelayanan kesehatan dasar	5.000.000.000	4.999.960.786	99,99
58.	Program umum dan kepegawaian	29.009.450	28.959.450	99,83
59.	Program perencanaan dan keuangan	85.632.200	85.250.000	99,55
60.	Program bantuan operasional kesehatan	22.274.583.400	21.065.596.600	94,57
61.	Program pelayanan medis dan penunjang medis	630.000.000	603.520.308	95,80
62.	Program akreditasi puskesmas	1.794.770.000	1.206.270.000	67,21
63.	Program jaminan persalinan	2.788.824.000	1.747.700.000	62,67
64.	Program stunting	750.000.000	698.913.988	93,19
65.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	15.845.540.800	12.948.616.300	81,72
66.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	5.315.389.988	5.259.956.846	98,96
67.	Program kebijakan dan manajemen kesehatan	28.798.000	28.798.000	100,00
68.	Program pendidikan pelatihan pengembangan dan akreditasi rumah sakit	39.735.000	38.209.650	96,16
69.	Program keperawatan	68.760.100	68.760.100	100,00
70.	Program penataan administrasi kependudukan	1.324.802.400	1.104.611.000	83,38
JUMLAH		95.568.557.601	83.839.250.566	88,00

SASARAN 11				
71.	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	2.117.974.300	2.032.804.500	96,00
72.	Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	90.870.000	90.595.000	99,70
73.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	108.220.000	107.345.000	99,19
JUMLAH		2.317.064.300	2.230.744.500	96,00
SASARAN 12				
74.	Program peningkatan kesejahteraan petani	10.760.000	10.550.000	98,05
75.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	13.100.000	13.100.000	100,00
76.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.872.263.000	2.841.232.650	98,92
77.	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	74.600.000	74.600.000	100,00
78.	Program pencegahan & penanggulangan penyakit ternak	80.750.000	78.700.000	97,46
79.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.713.390.000	1.710.215.000	99,81
80.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	49.100.000	46.850.000	95,42
81.	Program penyediaan sarana pengembangan prasarana dan sarana pertanian	5.862.239.500	5.776.732.864	98,54

82.	Program pengembangan data/informasi bidang pertanian	269.750.000	262.113.513	97,17
83.	Program peningkatan BP3K/BPP	34.095.000	32.345.000	94,87
84.	Program peningkatan kesejahteraan petani	63.697.500	63.647.500	99,92
85.	Program peningkatan ketahanan pangan	320.342.000	315.137.000	98,38
86.	Program pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan	48.675.000	48.625.000	99,90
87.	Program penanganan daerah rawan pangan	40.744.700	40.694.700	99,88
88.	Program pengembangan budidaya perikanan	1.418.005.445	1.413.785.810	99,70
89.	Program pengembangan perikanan tangkap	5.283.136.000	5.170.430.442	97,87
90.	Program pengembangan data dan informasi	332.507.800	330.677.800	99,45
JUMLAH		18.487.155.945	18.229.437.279	98,60
SASARAN 13				
91.	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas masyarakat adat, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	420.733.000	379.608.000	90,23
92.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	557.533.550	540.137.050	96,88
93.	Program pembinaan anak terlantar	59.115.000	59.115.000	100,00
94.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	83.400.000	57.070.000	68,43

JUMLAH		1.120.781.550	1.035.930.050	92,00
SASARAN 14				
95.	Program pembangunan jalan dan jembatan	35.285.296.160	28.913.706.090	81,94
96.	Program pembangunan turap/tulud/bronjong	15.000.000	14.900.000	99,33
97.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	4.586.497.500	2.863.146.700	62,43
98.	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	317.050.000	313.312.250	98,82
99.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.625.649.000	1.625.649.000	100,00
100.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1.173.084.000	912.509.000	77,79
101.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	7.238.276.080	6.667.378.000	92,11
102.	Program pengendalian banjir	2.580.425.700	2.030.303.021	78,68
103.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	4.116.435.000	3.689.705.000	89,63
104.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	6.766.086.929	6.235.579.503	92,16
105.	Program Perencanaan Tata Ruang	319.830.000	319.680.000	99,95
106.	Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000	299.250.000	99,75
107.	Program pengembangan perumahan	6.188.981.800	6.035.374.100	97,52
108.	Program pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum	915.383.000	877.973.060	95,91

109.	Program penataan kawasan permukiman	724.228.000	722.141.000	99,71
110.	Program pengembangan kinerja pengelolaan sanitasi	780.675.800	731.553.000	93,71
111.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	152.580.000	152.135.000	99,71
112.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	784.365.000	690.765.000	88,07
113.	Program peningkatan pelayanan angkutan	96.550.000	96.550.000	100,00
114.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	8.684.468.200	5.672.601.973	65,32
115.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	208.055.370	199.018.832	95,66
116.	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	16.750.000	15.284.093	91,25
117.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	550.000.000	548.510.000	99,73
JUMLAH		83.425.667.539	69.627.024.678	83,00
SASARAN 15				
118.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	112.130.000	112.080.000	99,96
119.	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahapan pasca bencana	127.140.000	111.265.000	87,51
120.	Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat	759.850.000	757.871.500	99,74

121.	Program bidang kedaruratan dan logistik	137.650.000	136.950.000	99,49
122.	Program pengembangan data dan informasi bencana	12.470.900	12.470.900	100,00
123.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	792.445.600	784.645.000	99,02
124.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	69.365.000	69.155.000	99,70
125.	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	138.619.800	138.531.300	99,94
126.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	12.130.000	12.130.000	100,00
127.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	205.705.000	205.325.050	99,82
JUMLAH		2.367.506.300	2.340.423.750	99,00
SASARAN 16				
128.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	57.386.300	54.743.300	95,39
129.	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.586.175.690	3.374.132.587	94,09
130.	Program pengembangan kemitraan	658.082.900	649.682.900	98,72
131.	Program perencanaan pengembangan pariwisata	145.507.800	145.507.800	100,00
JUMLAH		4.447.152.690	4.224.066.587	94,98

SASARAN 17 dan SASARAN 18				
132.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	61.815.000	60.165.000	97,33
133.	Pengembangan industri kecil dan menengah	5.676.794.400	5.312.259.400	93,58
134.	Penataan struktur industri	43.900.000	42.865.000	97,64
135.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	376.600.000	344.600.000	92,24
136.	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana umum	4.762.500.000	3.011.118.400	63,23
137.	Pengembangan industri rumah tangga dan kerajinan	52.348.550	49.391.000	94,35
138.	Peningkatan kesempatan kerja	69.540.956	69.540.956	100,00
JUMLAH		11.043.498.906	8.889.939.756	80,50
Total		486.341.724.645	395.528.569.482	81,32



BAB IV PENUTUP

Uraian secara menyeluruh tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat telah dipaparkan secara sistematis sebagaimana dalam bab-bab diatas, untuk itu dalam bab Penutup ini akan disajikan gambaran umum atas capaian kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2020, kesimpulan terhadap permasalahan umum tahun 2020 serta solusi pemecahan masalah yang akan ditempuh. Pelaporan LAKIP 2020, secara umum merupakan gambaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat yang mencakup 18 sasaran dan 97 indikator yang ditopang oleh 138 program utama yang dilaksanakan. Namun sesuai dengan tujuan penyusunan LAKIP yaitu pelaporan terhadap capaian kinerja atas perwujudan Visi dan Misi Kabupaten Seram Bagian Barat, maka mekanisme penyusunan LAKIP Kabupaten Seram Bagian Barat secara lebih spesifik disusun sesuai dengan penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana telah

ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017- 2022.

Laporan ini merupakan upaya perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat atas penggunaan berbagai sumber daya khususnya keuangan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Beberapa kendala yang ditemukan dalam proses penyusunan LAKIP Kabupaten Seram Bagian Barat yang menyebabkan belum tersusunnya dokumen LAKIP Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 secara maksimal sesuai dengan tata cara dan mekanisme penyusunan LAKIP antara lain :

1. Adanya beberapa jenis pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah yaitu antara lain Laporan Tahunan, LAKIP, LKPJ, LPPD, IPPD dan laporan keuangan daerah, dengan mekanisme penyajian yang berbeda-beda, namun dengan tengat waktu penyelesaian laporan yang bersamaan. Kondisi tersebut tentunya menyebabkan tidak terkonsentrasinya penyusunan laporan dengan baik dan terjadinya in-efisiensi pengalokasian sumber daya yang cukup besar hanya untuk sekedar memenuhi penyusunan laporan. Bila dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas, maka kondisi banyaknya jenis laporan yang harus tersusun dengan tengat waktu bersamaan tersebut, tentunya menjadi beban kerja yang tidak efektif bagi seluruh unit pelaksana penyusun pelaporan;
2. Penyesuaian indikator-indikator kinerja sasaran sebagaimana RPJMD yang telah ditetapkan, masih belum secara keseluruhan dapat dipahami dan terakselerasi dengan perencanaan OPD. Kondisi ini menyebabkan pada beberapa indikator kinerja sasaran yang dipaparkan belum memiliki data dan informasi pendukung yang mencukupi;
3. Masih ada beberapa indikator kinerja yang belum tepat, sesuai dan relevan dengan sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan, hal ini menyebabkan penjelasan atas analisis kinerja belum dapat dideskripsikan secara akurat;

4. pada awal bulan Maret terjadi bencana non alam (pandemi Covid19) yang terjadi di Indonesia sehingga berdampak ke seluruh wilayah yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Seram Bagian Barat, sehingga fokus pemerintah ditujukan kepada penanganan korban yang terpapar Covid19 yang mengakibatkan adanya perubahan langkah strategi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mendanai sistem pembangunan di Kabupaten Seram Bagian barat
5. RPJMD Kabupaten Seram Bagian Barat, yang merupakan landasan gerak bagi seluruh proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan perlu ditinjau kembali indikator – indikatornya sehingga saling sinergitas perencanaan antara perencanaan Kabupaten Seram Bagian Barat yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD Kabupaten Seram Bagian Barat dengan perencanaan yang dibangun oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dalam bentuk dokumen RENSTRA dan RENJA OPD. Sinergitas ini dilakukan melalui penajaman indikator-indikator kinerja mulai indikator kinerja out put, out come, sampai dengan indikator dampak dari setiap dokumen perencanaan, sehingga terjalin kesatuan arah gerak perencanaan antara Visi dan Misi Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Visi dan Misi yang dibangun oleh seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Berkenaan dengan kendala-kendala tersebut di atas, saran, usulan, langkah tindak lanjut yang dapat disampaikan dan dilaksanakan yaitu :

1. Perlu adanya penelaahan lebih lanjut dan perumusan kembali atas beberapa indikator kinerja daerah dan indikator kinerja sasaran sehingga dapat memilah indikator kinerja utama (prioritas) dari indikator-indikator kinerja sasaran yang ditetapkan.
2. Perlu dilaksanakannya pembinaan penyusunan Indikator Kinerja Utama pada setiap OPD, dalam proses perbaikan dan perubahan RENSTRA OPD yang merupakan landasan perencanaan program dan kegiatan OPD.

3. Perlu dilaksanakan sosialisasi yang berkelanjutan secara intensif dan menyeluruh pada segenap aparatur pemerintah, agar setiap individu memahami target kinerja yang harus diwujudkan secara bersama-sama.
4. Perlu peningkatan kualitas pengendalian, koordinasi, dan sistem informasi kinerja sehingga dapat memantau dan mengintegrasikan informasi kinerja secara menyeluruh dalam satu bentuk kegiatan.

Sangat disadari bahwa laporan ini belum mampu secara sempurna menyajikan data dan informasi dalam memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan. Namun demikian dengan segala keterbatasan dalam penyusunan dan pelaporan kinerja ini, kami berharap bahwa LAKIP tahun 2020 ini dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan khususnya dapat menjadi bahan evaluasi pada proses perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat di masa yang akan datang.





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. M. Yasin Payapo, M.Pd**
Jabatan : Bupati Seram Bagian Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Piru, 26 Oktober 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya pembenahan kapasitas pemerintah yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62 %
		Opini BPK	WDP
		Nilai akuntabilitas Kinerja	C
		Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan	90 %
		Persentase Konsistensi Perencanaan Daerah	100 %
		Produk Perda/Perbup Yang Dihasilkan	15
		Persentase Arsip Yang Tertata Baik	57 %
2.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparat sipil negara	Persentase kesesuaian tingkat pendidikan formal dengan jabatan structural	80 %
		Tingkat kompetensi aparatur	90 %
3.	Mendorong terwujudnya penataan dan pemekaran wilayah secara berjenjang	Peningkatan status desa administrative	80 %
		Jumlah Pembentukan BUMDES	33
		Cakupan Kelompok Binaan PKK	104
		Pemekaran Wilayah Kecamatan	3

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Cakupan kajian pemekaran wilayah	3
4.	Menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan yang lebih baik	Indeks Kebahagiaan	65%
5.	Meningkatnya layanan kehidupan beragama	Indeks Kebahagiaan	72%
6.	Menurunnya angka KDRT	Presentasi penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	50
		Presentasi penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	53,3
7.	Menurunnya angka penyakit masyarakat (Pekat)	Persentasi penurunan Pekat	30
		Persentasi partisipasi masyarakat dalam penyalur hak politik	90
8.	Teraktualisasinya nilai-nilai budaya Pela Gandong dan Masohi srbagai modal sosial pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat	Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketenteraman	30
		Meningkatnya kegiatan budaya orang basudara (Masohi)	5 kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
9.	Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan	Fasilitas kondisi baik SD/MI	59
		Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP	56
		Persentasi kelulusan SD/MI	100%
		Persentasi kelulusan SMP/MTs	100%
		Persentasi Guru berkualifikasi S1/D-IV	91,24%
		Persentasi Guru bersertifikasi	978
		Rata-rata harapan lama bersekolah	8,46
		Presentase SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B	24
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	46
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100
		Angka Pendidikan yang ditamatkan SD	35%
		Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP	26%
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,96%	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89,53%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	1.056
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	1.126
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,025
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	85%
		Angka Melanjutka (AM) SMP/MTs ke MA/SMK/MA	93%
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	96,14
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	839
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,029
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,05

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	55,41
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100%
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%
		Jumlah Perpustakaan	263 Bh
		Jumlah Kunjungan Perpustakaan/Tahun	70 Kali/Thn
10.	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	1 : 2306,9
		Angka Umur Harapan Hidup	65
		Jumlah Kematian Ibu melahirkan	4 Jiwa
		Angka Kematian Bayi	7 Jiwa
		Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	1 : 425
		Persentase KB Aktif dan Mandiri	45%
		Jumlah penduduk yang terlayani KTP	75
11.	Meningkatnya kinerja koperasi, industri kecil dan usaha mikro.	Presentase koperasi aktif	118
		Pertumbuhan wirausaha baru	20
		Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha	100
		Jumlah sentra Industri	3,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52
12.	Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan	Produksi hasil pertanian (ton/tahun)	5,79
		Ketersediaan pangan utama	375,17
		Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	78,22
		Nilai tukar nelayan (NTN)	16.682,8

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Produksi hasil perikanan (ton/tahun)	26.176,67
		Produksi hasil perkebunan (ton/tahun)	13.785,57
13.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentasi penurunan angka miskin	2,46
		Jumlah PMKS penerima bantuan	530
14.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infastruktur	Persentasi panjang jalan kondisi baik	68,46
		Persentasi panjang jembatan kondisi baik	42,33
		Cakupan pelayanan air minum	88
		Presentase penataan kawasan permukiman	52,40%
		Persentasi fasilitas dan infrastruktur perhubungan yang baik	21,68%
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	10.895,926
		Persentasi layanan IT	40
15.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup	Indeks resiko bencana	127
		Jumlah timbulan sampah perhari	35,42

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Timbunan sampah yang tertangani	19,48
16.	Terbukanya isolasi daerah sekaligus menunjang pembangunan potensi kepariwisataan	Jumlah objek pariwisata andalan	8 Objek
Jumlah kunjungan wisatawan		24.100 Wisatawan	
Lama tinggal wisatawan Nusantara		3 hari	
Lama tinggal wisatawan Mancanegara		2 hari	
Kegiatan budaya dan pesta adat		7	
Jumlah benda dan situs sejarah yang dilestarikan		21	
17.	Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	6,87
Persentasi Pertumbuhan Investasi		20	
Waktu penyelesaian izin		2	
Angka partisipasi angkatan kerja		72,54	
Tingkat pengangguran terbuka		10,50	
18.	Meningkatnya daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi local	Persentasi produk masyarakat yang masuk pasaran	15

**PROGRAM REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT**

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
SASARAN 1			
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	76.061.553.523	APBD
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	21.991.258.448	APBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	449.340.720	APBD
4.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1.038.027.900,00	APBD
5.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.924.244.884	APBD
6.	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	14.402.785.000	APBD
7.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	3.980.857.830	APBD
8.	Program peningkatan pelayanan barang/jasa	154.000.000	APBD
9.	Program pengembangan komunikasi dan informasi media massa	396.175.000	APBD
10.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	55.809.400	APBD

11.	Program penataan peraturan perundang-undangan daerah	327.622.800	APBD
12.	Program peningkatan kesadaran hukum masyarakat	110.207.000	APBD
13.	Program pengembangan data/informasi	465.771.600	APBD
14.	Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	161.017.800	APBD
15.	Program perencanaan pembangunan daerah	2.298.462.650	APBD
16.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	113.986.000	APBD
17.	Program perencanaan sosial budaya	289.553.600	APBD
18.	Program pengembangan wilayah dan SDA	94.833.600	APBD
19.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	6.305.053.245	APBD
20.	Program penelitian dan pengembangan	603.212.550	APBD
21.	Program pengembangan data/informasi	63.096.500	APBD
22.	Program Inovasi Daerah	359.085.900	APBD
23.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	342.800.000	APBD
24.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	83.577.000	APBD
25.	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	110.000.000	APBD

SASARAN 2			
26.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.015.171.100	APBD
27.	Program penataan kelembagaan perangkat daerah	171.126.300	APBD
SASARAN 3			
28.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	4.024.855.700	APBD
29.	Program penataan daerah otonomi baru	254.318.500	APBD
30.	Program peningkatan pelayanan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	799.253.000	APBD
31.	Program peningkatan pelayanan bidang pembangunan kawasan perdesaan	169.121.000	APBD
32.	Program peningkatan pelayanan bidang pemerintahan desa	331.150.500	APBD
33.	Program pengendalian pembangunan daerah	1.507.472.895	APBD
34.	Program penataan kelembagaan desa	10.000.000	APBD
SASARAN 4 dan SASARAN 5			
35.	Program pembinaan lembaga sosial dan keagamaan	1.754.628.800	APBD
36.	Program pendidikan dan kesehatan	164.614.000	APBD

SASARAN 6			
37.	Program keluarga berencana	4.991.019.400	APBD+DAK
38.	Program kesehatan reproduksi remaja	49.025.000	APBD
39.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	28.661.800	APBD
SASARAN 7 dan SASARAN 8			
40.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	127.500.000	APBD
41.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.184.869.400	APBD
42.	Program pendidikan politik masyarakat	18.285.000	APBD
SASARAN 9			
43.	Program pendidikan anak usia dini	4.254.026.700	APBD + DAK
44.	Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun	111.498.598.169	APBD + DAK
45.	Program pendidikan non formal	524.687.500	APBD
46.	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	1.680.120.500	APBD
47.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	517.120.350	APBD
48.	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	43.306.250	APBD

49.	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	263.075.000	APBD
SASARAN 10			
50.	Program obat dan perbekalan kesehatan	1.852.733.700	APBD+DAK
51.	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	24.746.648	APBD
52.	Program perbaikan gizi masyarakat	50.000.000	APBD
53.	Program pengembangan lingkungan sehat	35.000.000	APBD
54.	Program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular	1.206.044.000	APBD
55.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	36.375.162.915	APBD+DAK
56.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	49.025.000	APBD
57.	Program pelayanan kesehatan dasar	5.000.000.000	APBD+DAK
58.	Program umum dan kepegawaian	29.009.450	APBD
59.	Program perencanaan dan keuangan	85.632.200	APBD
60.	Program bantuan operasional kesehatan	17.285.663.000	APBD+DAK
61.	Program pelayanan medis dan penunjang medis	630.000.000	APBD
62.	Program akreditasi puskesmas	1.794.770.000	APBD+DAK

63.	Program jaminan persalinan	2.788.824.000	APBD
64.	Program stunting	750.000.000	APBD
65.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	15.845.540.800	APBD
66.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	5.315.389.988	APBD+DAK
67.	Program kebijakan dan manajemen kesehatan	28.798.000	APBD
68.	Program pendidikan pelatihan pengembangan dan akreditasi rumah sakit	39.735.000	APBD
69.	Program keperawatan	68.760.100	APBD
70.	Program penataan administrasi kependudukan	1.324.802.400	APBD
SASARAN 11			
71.	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	2.117.974.300	APBD
72.	Program pengembangan system pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	90.870.000	APBD
73.	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	108.220.000	APBD
SASARAN 12			
74.	Program peningkatan kesejahteraan petani	10.760.000	APBD
75.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian / perkebunan	13.100.000	APBD

76.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.872.263.000	APBD
77.	Program pemberdayaan penyuluhan pertanian/perkebunan lapangan	74.600.000	APBD
78.	Program pencegahan & penanggulangan penyakit ternak	80.750.000	APBD
79.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.713.390.000	APBD
80.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	49.100.000	APBD
81.	Program penyediaan sarana pengembangan prasarana dan sarana pertanian	5.862.239.500	APBD
82.	Program pengembangan data/informasi bidang pertanian	269.750.000	APBD
83.	Program peningkatan BP3K/BPP	34.095.000	APBD
84.	Program peningkatan kesejahteraan petani	63.697.500	APBD
85.	Program peningkatan ketahanan pangan	320.342.000	APBD
86.	Program pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan	48.675.000	APBD
87.	Program penanganan daerah rawan pangan	40.744.700	APBD
88.	Program pengembangan budidaya perikanan	1.418.005.445	APBD
89.	Program pengembangan perikanan tangkap	5.283.136.000	APBD
90.	Program pengembangan data dan informasi	332.507.800	APBD

SASARAN 13			
91.	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas masyarakat adat, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya	420.733.000	APBD
92.	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	557.533.550	APBD
93.	Program pembinaan anak terlantar	59.115.000	APBD
94.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	83.400.000	APBD
SASARAN 14			
95.	Program pembangunan jalan dan jembatan	35.285.296.160	APBD
96.	Program pembangunan turap/tulud/bronjong	15.000.000	APBD
97.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	4.586.497.500	APBD + DAK
98.	Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan	317.050.000	APBD
99.	Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	1.625.649.000	APBD
100.	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	1.173.084.000	APBD
101.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	7.238.276.080	APBD
102.	Program pengendalian banjir	2.580.425.700	APBD
103.	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	4.116.435.000	APBD

104.	Program pembangunan infrastruktur perdesaaan	6.766.086.929	APBD
105.	Program Perencanaan Tata Ruang	319.830.000	APBD
106.	Program Pemanfaatan Ruang	300.000.000	APBD
107.	Program pengembangan perumahan	6.188.981.800	APBD
108.	Program pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum	915.383.000	APBD
109.	Program penataan kawasan permukiman	724.228.000	APBD
110.	Program pengembangan kinerja pengelolaan sanitasi	780.675.800	APBD
111.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	152.580.000	APBD
112.	Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	784.365.000	APBD
113.	Program peningkatan pelayanan angkutan	96.550.000	APBD
114.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	8.684.468.200	APBD
115.	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	208.055.370	APBD
116.	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	16.750.000	APBD
117.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	550.000.000	APBD

SASARAN 15			
118.	Program pencegahan dan kesiapsiagaan	112.130.000	APBD
119.	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahapan pasca bencana	127.140.000	APBD
120.	Program penanggulangan bencana berbasis masyarakat	759.850.000	APBD
121.	Program bidang kedaruratan dan logistic	137.650.000	APBD
122.	Program pengembangan data dan informasi bencana	12.470.900	APBD
123.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	792.445.600	APBD
124.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	69.365.000	APBD
125.	Program Perlindungan dan Konservasi SDA	138.619.800	APBD
126.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	12.130.000	APBD
127.	Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut	205.705.000	APBD
SASARAN 16			
128.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	57.386.300	APBD
129.	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.586.175.690	APBD
130.	Program pengembangan kemitraan	658.082.900	APBD

131.	Program perencanaan pengembangan pariwisata	145.507.800	APBD
SASARAN 17 dan SASARAN 18			
132.	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	61.815.000	APBD
133.	Pengembangan industri kecil dan menengah	5.676.794.400	APBD
134.	Penataan struktur industry	43.900.000	APBD
135.	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	376.600.000	APBD
136.	Pembangunan dan rehabilitasi prasarana umum	4.762.500.000	APBD
137.	Pengembangan industri rumah tangga dan kerajinan	52.348.550	APBD
138.	Peningkatan kesempatan kerja	69.540.956	APBD
TOTAL		486.341.724.645	

Piru, 26 Oktober 2020

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



MOHAMMAD YASIN PAYAPO

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya pembedaan kapasitas pemerintah yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	62	49,49	79,82
		Opini BPK	WDP	WDP	100
		Nilai akuntabilitas kinerja	C	C	100
		Persentase Peningkatan Pendapatan Daerah	90%	79,65	88,50
		Persentase konsistensi perencanaan daerah	100%	91,15	91,15
		Produk Perda yang dihasilkan	15 Perda/Perbup	6	40
		Persentase arsip yang tertata baik	57%	0,33	0,60
2.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas aparat sipil negara	Persentase kesesuaian tingkat pendidikan formal dengan jabatan structural	80%	86,69	108,36
		Tingkat kompetensi aparatur	90%	3,38	3,75
3.	Mendorong terwujudnya penataan dan pemekaran wilayah secara berjenjang	Peningkatan status desa administrative	80%	0	0
		Jumlah Pembentukan BUMDES	33 BUMDES	93,47	283,2
		Cakupan Kelompok Binaan PKK	104 Kelompok	558	536,53
		Pemekaran Wilayah Kecamatan	3	0	0
		Cakupan kajian pemekaran wilayah	3	2	66,67

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
4.	Menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan yang lebih baik	Indeks Kebahagiaan	65	61,75	95
5.	Meningkatnya layanan kehidupan beragama	Indeks Kebahagiaan	72	68,8	95
6.	Menurunnya angka KDRT	Presentasi penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak	50%	0	0
		Presentasi penurunan Prevalensi Kekerasan terhadap perempuan	53,3%	0	0
7.	Menurunnya angka penyakit masyarakat (Pekat)	Persentasi penurunan Pekat	30%	0	0
		Persentasi partisipasi masyarakat dalam penyalur hak politik	90%	0	0
8.	Teraktualisasinya nilai-nilai budaya Pela Gandong dan Masohi srbagai modal sosial pembangunan Kabupaten Seram Bagian Barat	Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketenteraman	30%	20	66,67
		Meningkatnya kegiatan budaya orang basudara (Masohi)	5 kegiatan	0	0

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
9.	Meningkatnya pemerataan keteersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan pendidikan	Fasilitas kondisi baik SD/MI	59%	50,92	86%
		Fasilitas Kondisi Baik Sekolah SMP	56%	28	51%
		Persentasi kelulusan SD/MI	100%	100	100,00%
		Persentasi kelulusan SMP/MTs	100%	100	100,00%
		Persentasi Guru berkualifikasi S1/D-IV	91,24%	59,50	65,21%
		Persentasi Guru bersertifikasi	97,8%	795	84%
		Rata-rata harapan lama bersekolah	8,46%	8,45	99,88%
		Presentase SD/MI, SMP/MTs berakreditasi minimal B	24%	61%	255%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	46%	64,64%	141%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%	97%	97%
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	100%	79%	79%
		Angka Pendidikan yang ditamatkan SD	35%	16,91%	48%
		Angka Pendidikan yang ditamatkan SMP	26%	11,48%	44%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98.96%	77,00%	78%		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	89.53%	55,96%	62%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	1,056%	777,79	74%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	1,126%	686,41	61%
		Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.010%	0,71	1,41%
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.025%	0,71	3,50%
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	100	100%
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	100	100%
		Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke SMP/MTs	85%	71	84%
		Angka Melanjutka (AM) SMP/MTs ke MA/SMK/MA	93%	106	114%
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	96.14%	76,67	80%
		Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	839	916	109,14%
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.029	0,06	46%
		Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0.163	0,23	22%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	55.41	14,81	27%
		Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	100%	100	100%
		Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	100%	99	99%
		Jumlah Perpustakaan	263 Bh	246	94%
		Jumlah Kunjungan Perpustakaan/Tahun	70 Kali/Thn	0	0
10.	Meningkatnya kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat	Rasio jumlah Puskesmas dan Pustu terhadap penduduk	1 : 2306,9	1 : 2.445	106
		Angka Umur Harapan Hidup	65	85	130
		Jumlah Kematian Ibu melahirkan	4	6	50
		Angka Kematian Bayi	7	7	100
		Presentase Penemuan dan penanganan penderita dan masalah gizi	100%	100	100
		Rasio SDM Kesehatan per Penduduk	1 : 425	1 ; 225	52,9

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Persentase KB Aktif dan Mandiri	45	56	124,44
		Jumlah penduduk yang terlayani KTP	75%	81,3	108,4
11.	Meningkatnya kinerja koperasi, industri kecil dan usaha mikro.	Persentase koperasi aktif	118%	122	103
		Pertumbuhan wirausaha baru	20	13	65
		Usaha mikro yang difasilitasi modal usaha	100%	100	100
		Jumlah sentra Industri	3,00	3	100
		Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	52	86,96	167,23
12.	Meningkatnya produksi nilai tambah dan pemasaran hasil pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan	Produksi hasil pertanian (ton/tahun)	5,9	5.4	91,5
		Ketersediaan pangan utama	375,17	554,1	147,7
		Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Thn)	78,22	63,02	80,6
		Nilai tukar nelayan (NTN)	16.682,8	-	-
		Produksi hasil perikanan (ton/tahun)	26.176,67	32.515,57	124,2
		Produksi hasil perkebunan (ton/tahun)	13,785,57	12.611	119

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
13.	Menurunnya angka kemiskinan	Persentasi penurunan angka miskin	2,46%	2,40	97,7
		Jumlah PMKS penerima bantuan	530 PMKS	432	81,5
14.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infastruktur	Persentasi panjang jalan kondisi baik	68,46	51,96	75,90
		Persentasi panjang jembatan kondisi baik	42,33	-	0
		Cakupan pelayanan air minum	88 %	70,42	80,02
		Presentase Penataan Kawasan Permukiman	62,40 %	106	169,87
		Persentasi fasilitas dan infrastruktur perhubungan yang baik	21,68 %	20,05	92,5
		Jumlah arus penumpang angkutan umum	10.895.926	123.463	1,13
		Persentasi layanan IT	40	50	125,00
15.	Meningkatnya kualitas pengelolaan Lingkungan hidup	Indeks resiko bencana	127	20	15,74
		Jumlah timbulan sampah perhari	35,42	31,64	89,32
		Timbunan sampah yang tertangani	19,48	7	35,93
16.	Terbukanya isolasi daerah sekaligus menunjang pembangunan potensi	Jumlah objek pariwisata andalan	8 Objek	3	37,5
		Jumlah kunjungan wisatawan	24.100	8.909	36,9
		Lama tinggal wisatawan Nusantara	3	2	66

	kepariwisataan	Lama tinggal wisatawan Mancanegara	3,25	-	-
		Kegiatan budaya dan pesta adat	7	1	14,3
		Jumlah benda dan situs sejarah yang dilestarikan	21	0	0
17.	Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah	Pertumbuhan PDRB	6,87 %	5,56	80
		Persentasi Pertumbuhan Investasi	20 %	24	120
		Waktu penyelesaian izin	2 hari	2	100
		Angka partisipasi angkatan kerja	72,54 %	19,6	27,01
		Tingkat pengangguran terbuka	10,50 %	20	190,5
18.	Meningkatnya daya saing dan menjaga stabilitas ekonomi lokal	Persentasi produk masyarakat yang masuk pasaran	15 %	18,98	126,53



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Trans Seram - telp/fax (0911) - Piru

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU TERHADAP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2020

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Piru, 27 Maret 2021

INSPEKTUR 

Drs. ABDULAH FAKAUBUN

Pembina Tk. I

NIP. 196307251990031007



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
INSPEKTORAT DAERAH
Jl. Trans Seram - telp/fax (0911) - Piru

KERTAS KERJA REVIU TERHADAP
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

NO	PERNYATAAN	CHECK LIST	KETERANGAN	
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LK) telah menampilkan data penting instansi pemerintah (IP)	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√	
II.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
III.	Substansi	1. Tujuan /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan /sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		4. Tujuan /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	

		5. Tujuan /sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 & 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	√	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	cukup dan memadai

TIM REVIU
Pengendali Teknis


Dj. Maruapey

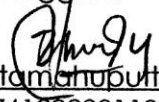
NIP. 197104171992031008


Ketua Tim



J. J. Wennp. SH


NIP. 1977907262007011014

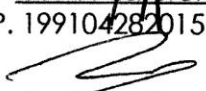
Anggota


A.Z. Litamanupully, S.Pt
NIP.197612022011012005


O. Salawaney, A.Md
NIP.197902212011012006


K. D. Patiwealapia
NIP.197410302006042007


G. A. Pesiferon, SE
NIP. 199104282015121001


Rudy Leatemia
NIP.197810102014111001

